

SERI ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2015



Savu Sea

Savu



Pulau Rote



ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1.	KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH	1
1.1.	PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA	1
1.2.	KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA	4
2.	ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH	8
2.1.	ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA	8
2.1.1.	Pendidikan	8
2.1.2.	Kesehatan	10
2.1.3.	Perumahan	13
2.1.4.	Mental/Karakter	14
2.2.	ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN	16
2.2.1.	Pengembangan Sektor Pangan	16
2.2.2.	Pengembangan Sektor Energi	22
2.2.3.	Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan	24
2.2.4.	Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri	26
2.3.	ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	29
2.3.1.	Pusat Pertumbuhan Wilayah	29
2.3.1.1	Kawasan Ekonomi Khusus	30
2.3.1.2	Kawasan Industri	30
2.3.2.	Kesenjangan intra wilayah	30
3.	ISU STRATEGIS WILAYAH	32
4.	REKOMENDASI KEBIJAKAN	41
5.	PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016	42

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

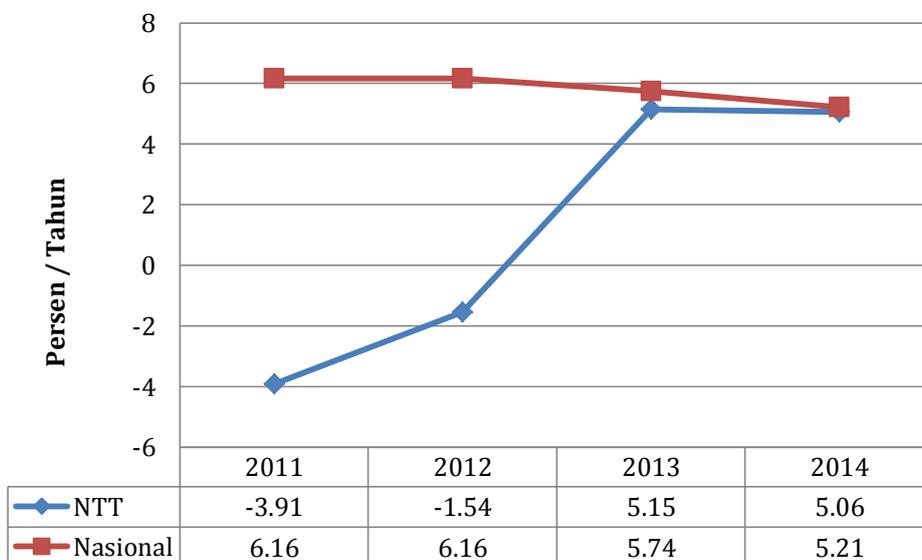
1.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Nusa Tenggara Timur dengan keanekaragaman sumberdaya alam yang beragam berpotensi untuk meningkatkan perekonomiannya. Kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2011-2014 cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 1,19 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,9 persen (Gambar 1). Pada tahun 2011 dan 2012 perekonomian di NTT mengalami perlambatan (pertumbuhan ekonomi negatif) karena pengaruh dari kegiatan ekspor impor.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010

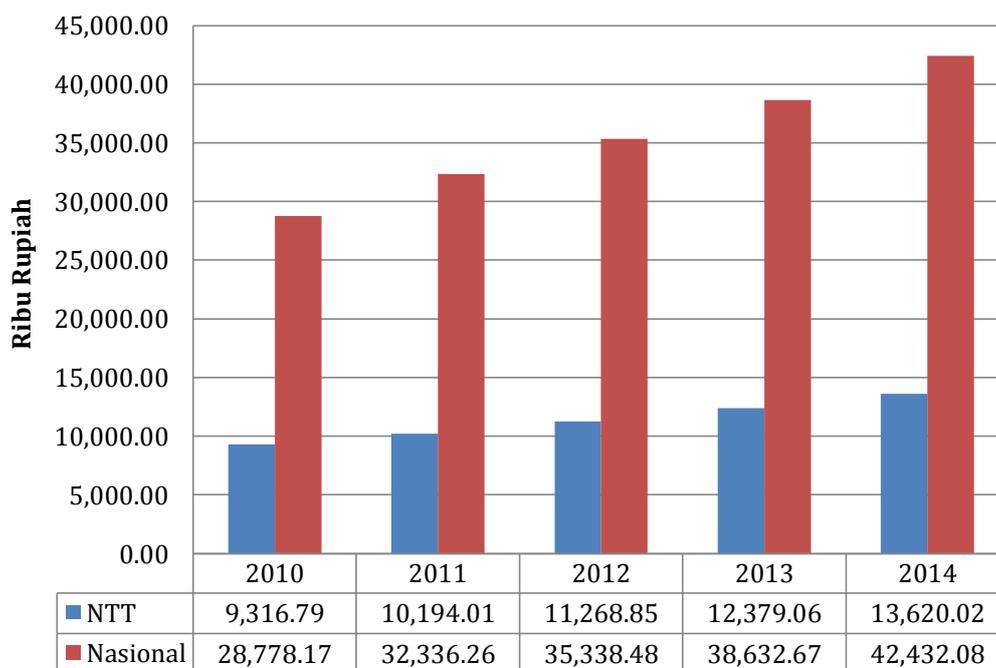


Sumber: BPS, 2014



Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di NTT selama kurun waktu 2010 – 2014 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di provinsi ini walaupun masih jauh dari rata-rata nasional pada periode tersebut. Jika pada tahun 2010 rasio antara PDRB perkapita NTT dan PDB nasional sebesar 32,37 persen, maka pada tahun 2014 rasionya sedikit menurun menjadi 32,10 persen (Gambar 2). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

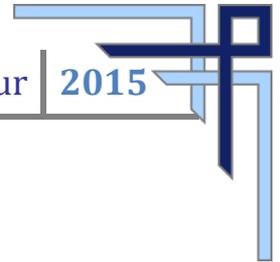
Gambar 2
PDRB Per Kapita ADHB



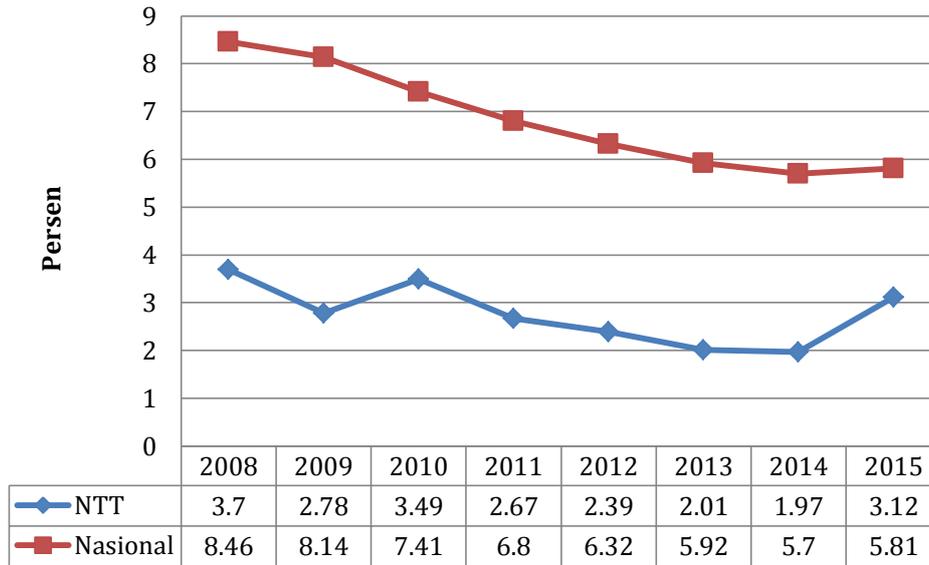
Sumber: BPS, 2014

1.1.2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran di Provinsi NTT berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional selama kurun waktu 2008-2015 (Gambar 3). Pada periode tersebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTT berkurang sebesar 2,65 persen dan berada di bawah TPT nasional. Tingginya tingkat pengangguran seiring dengan pendapatan per kapita yang rendah, yang mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah. Rendahnya tingkat pengangguran dengan pendapatan perkapita yang rendah mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.



Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

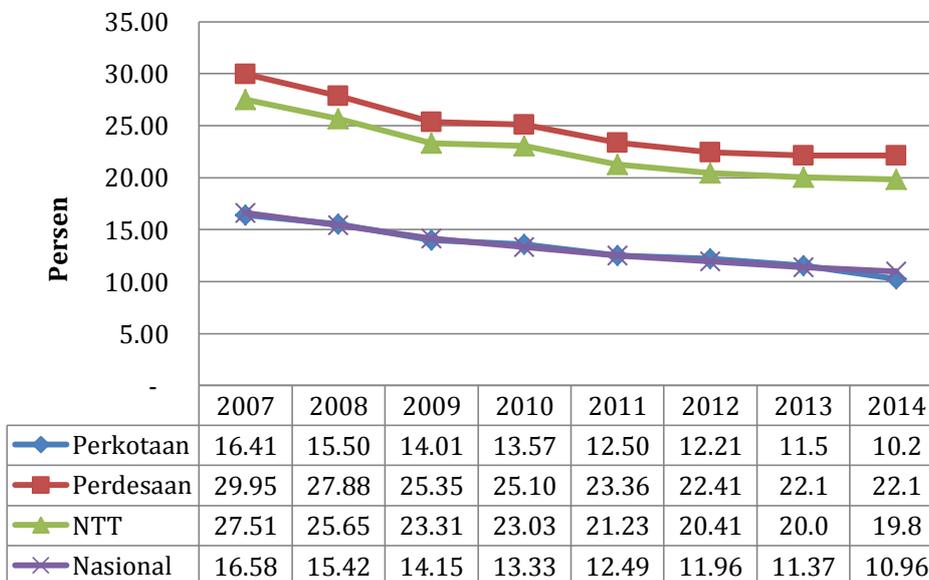


Sumber: BPS, 2015

1.1.3. Pengurangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan NTT pada tahun cenderung menurun namun berada di atas rata-rata nasional. Selama kurun waktu 2010-2014 kemiskinan di NTT berkurang sebesar 3,03 persen (Gambar 4). Persentase penduduk miskin di NTT tergolong tinggi, pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di nasional mencapai 10,96 persen, sedangkan di NTT sebesar 19,8 persen. Kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

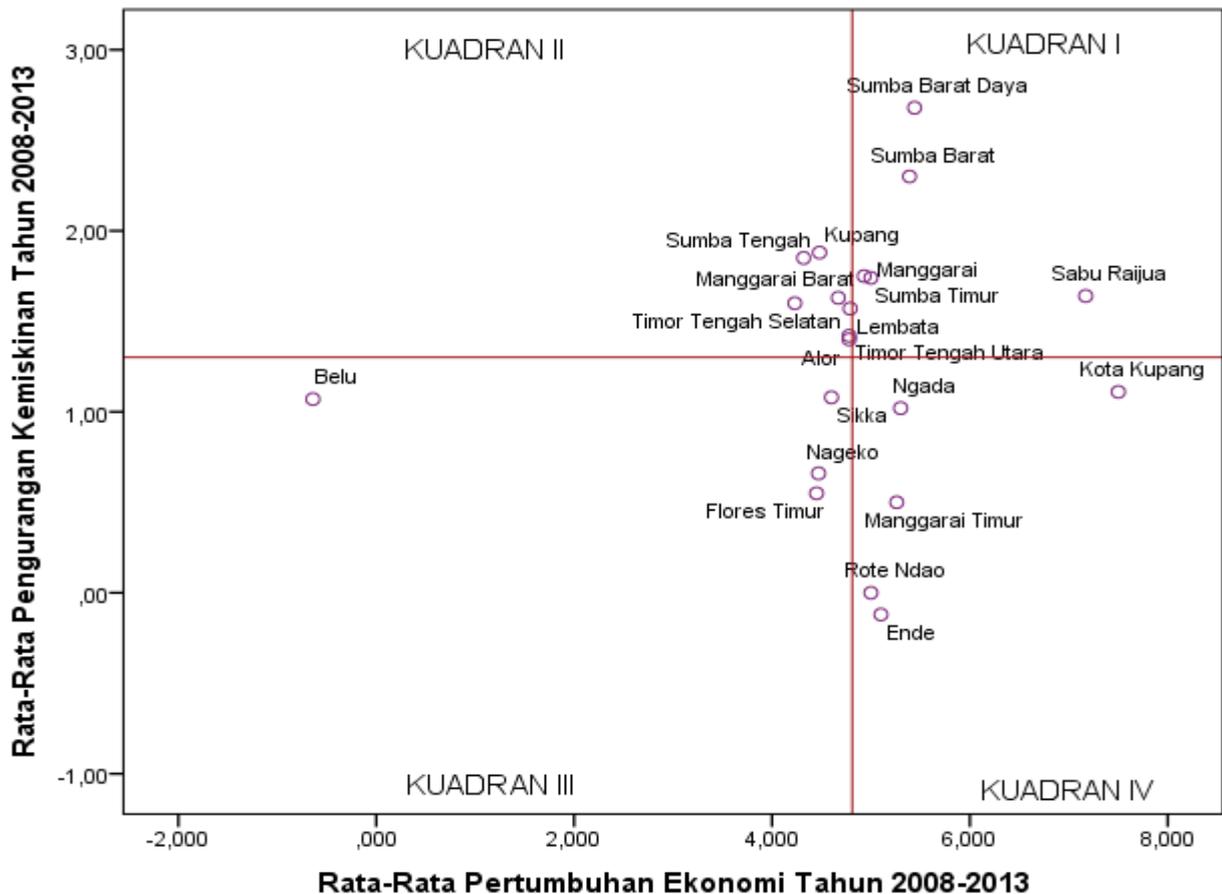
1.2. KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi NTT menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Manggarai, Sumba Timur, dan Sabu Raijua termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuadran ini dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi NTT Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Kedua, Kabupaten Sumba Tengah, Kupang, Manggarai Barat, Lembata, Timor Tengah Selatan, dan Alor terletak di kuadran II yang termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Belu, Flores Timur, Sikka, dan Nageko terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

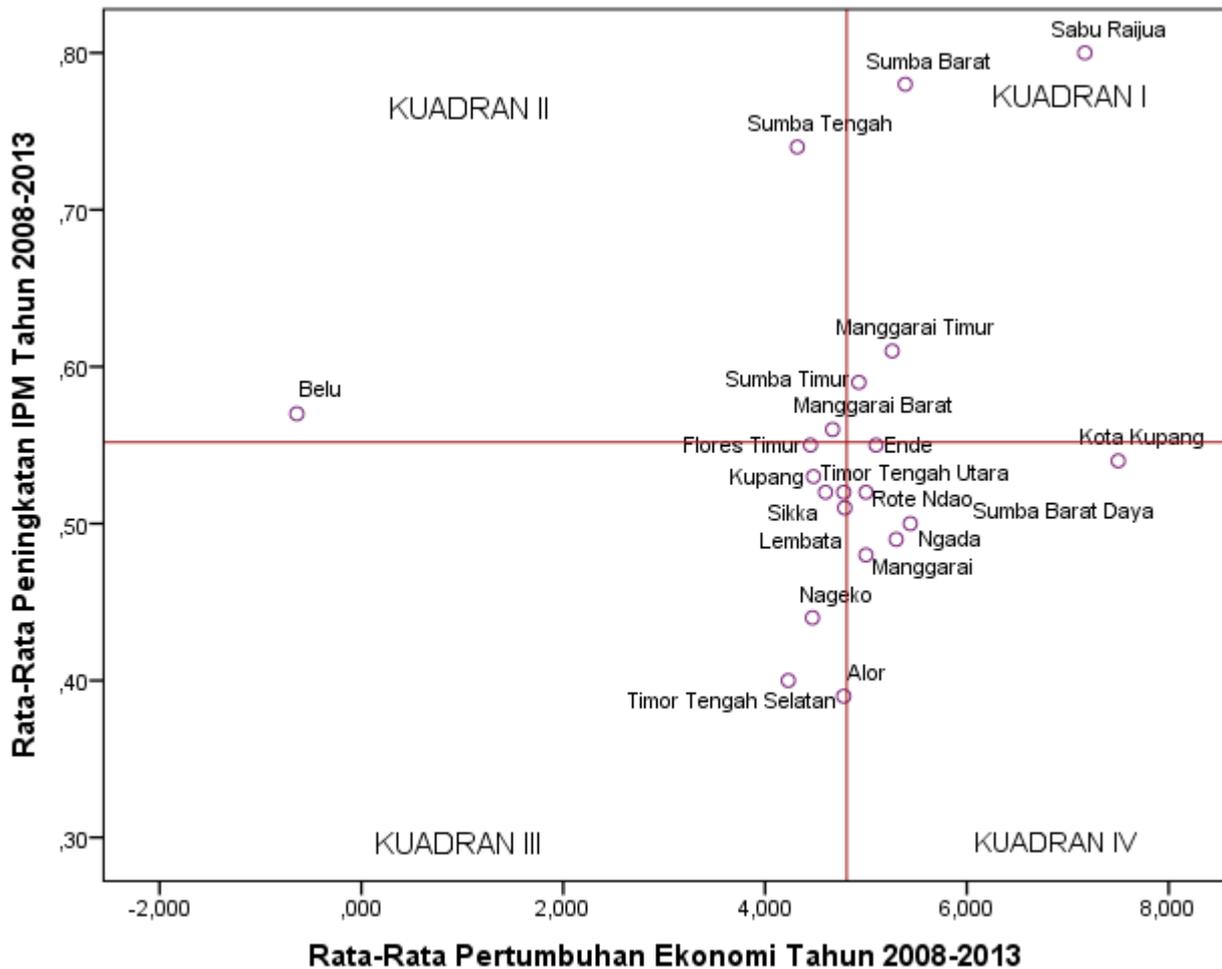
Keempat, Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Rote Ndao, Ende, dan Kota Kupang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi NTT berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013. *Pertama*, Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Barat, Manggarai Timur, dan Sumba Timur terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Sumba Tengah, Manggarai Barat, dan Belu terletak di kuadran II yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM
Provinsi NTT Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Flores Timur, Kupang, Timor Tengah Utara, Sikka, Lembata, Nageko, Timor Tengah Selatan, dan Alor terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

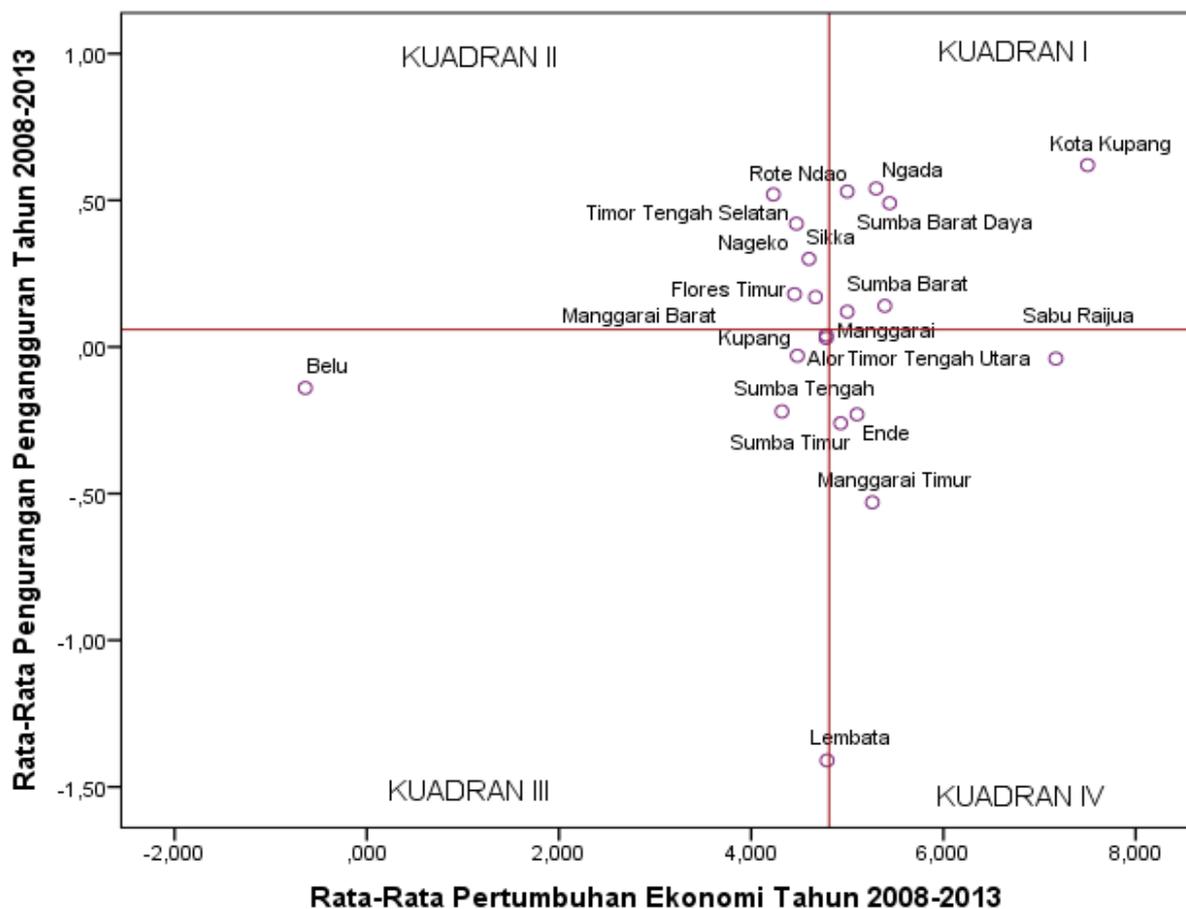
Keempat, Kabupaten Ende, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Ngada, Manggarai, dan Kota Kupang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi NTT menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2013. *Pertama*, Kabupaten Ngada, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Manggarai, dan Kota Kupang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sikka, Nageko, Flores Timur, dan Manggarai Barat terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Provinsi NTT Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Belu, Sumba Tengah, Kupang, dan Alor terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai Timur, Lembata, Sumba Timur, dan Ende terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal

2. ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah berkelanjutan bersifat multidimensi sehingga diperlukan analisis pembangunan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah publik. Analisis pembangunan wilayah didasarkan pada dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan.

2.1. ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA

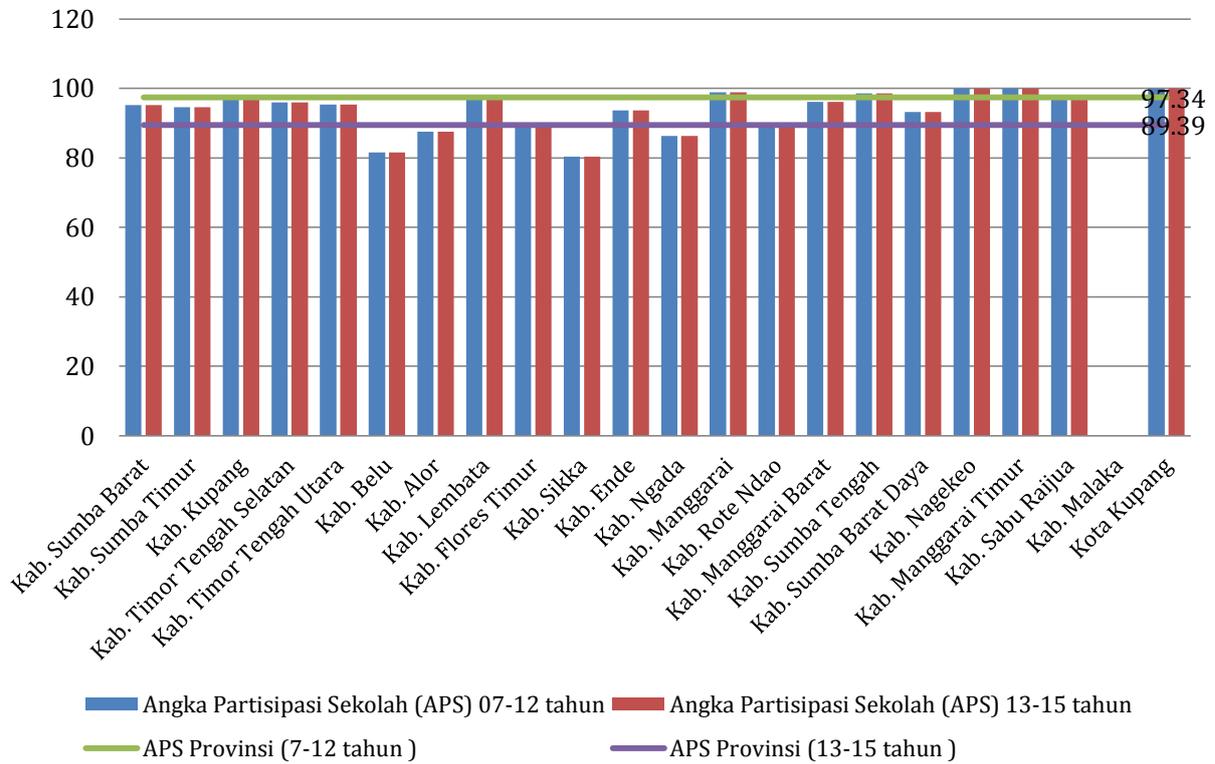
2.1.1. Pendidikan

Hakikat pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk suatu daerah. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan ketrampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Pembangunan sektor pendidikan di NTT memiliki peran penting dan strategis sesuai amanat konstitusi amandemen UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1), yaitu dana pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD. Oleh karena itu pemerintah perlu memprioritaskan perkembangan capaian pendidikan di NTT.

Adanya pendidikan yang memadai diharapkan akan dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Pembangunan pendidikan merupakan kegiatan investasi pada sumber daya manusia. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah terpenuhinya layanan pendidikan dasar, kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Indikator keberhasilan dalam pencapaian layanan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Maluku Utara belum merata (Gambar 8). Rata-rata APS Provinsi Maluku Utara tahun 2013 sebesar 97,34 persen untuk usia 7-12 tahun dan 89,39 persen untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi NTT yang memiliki APS

pendidikan dasar terendah adalah Kabupaten Sikka yaitu sebesar 80,32 persen, artinya masih ada 19,68 persen anak usia 7-13 tahun yang belum bersekolah.

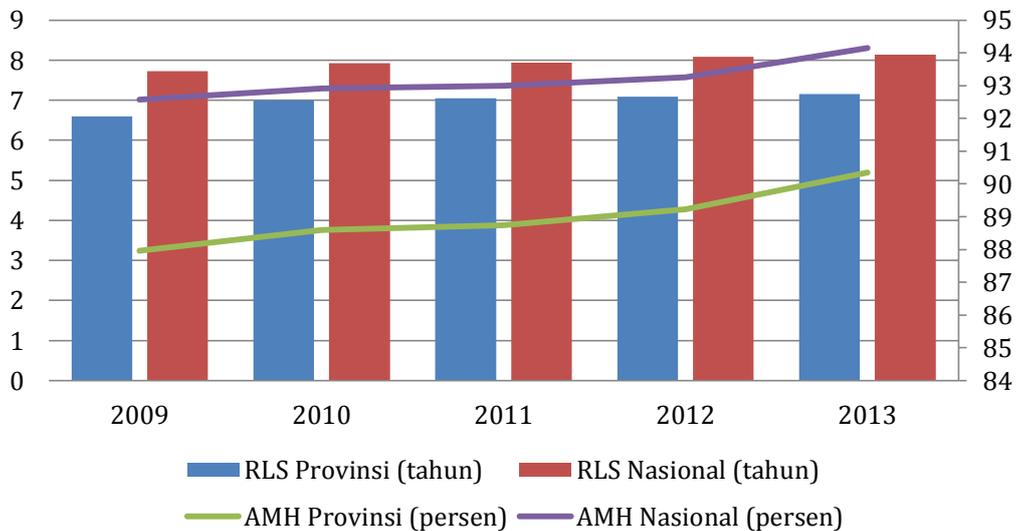
Gambar 8
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Persen)



* Kab Malaka - data belum tersedia

Sumber: BPS, 2013

Gambar 9
Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013



Sumber: BPS, 2013



Capaian APS beberapa kabupaten dan kota di NTT untuk pendidikan dasar sudah mencapai 100 persen namun APS tingkat pendidikan menengah dan tinggi masih rendah. Capaian APS pendidikan NTT berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) sebagai indikator keberhasilan pembangunan oleh MDGs di Provinsi NTT (Gambar 9). Banyak murid sekolah yang lulus pada jenjang pendidikan dasar tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya partisipasi pendidikan tingkat menengah maupun perguruan tinggi disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sarana pendidikan. Kondisi ini yang menyebabkan angka putus sekolah setiap Kabupaten/Kota di NTT pada berbagai jenjang khususnya SMP meningkat. RLS di Provinsi NTT 6,9 tahun, lebih rendah dari RLS nasional sebesar 8 tahun. Rata-rata penduduk NTT hanya bersekolah sampai kelas 6 SD atau sudah putus sekolah di pendidikan dasar. Sementara itu AMH Provinsi NTT tahun 2009-2013 berkisar pada angka 85 persen dan terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan AMH nasional. AMH dan RLS di Provinsi NTT tidak merata, salah satunya disebabkan karena keterbatasan infrastruktur terkait kualitas pendidikan. Kendala lainnya adalah penyerapan tenaga guru yang tidak berimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan, satu guru bisa mengajar lima kelas untuk tingkat SD karena kekurangan guru. Kurangnya sarana pendukung proses belajar mengajar juga menyebabkan perkembangan pendidikan di NTT terhambat, antara lain kurangnya laboratorium, buku-buku, perpustakaan, dan fasilitas pendidikan lain.

Indikator lain yang menentukan kualitas pendidikan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada tahun 2014, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di NTT yang berpendidikan minimal SD sebesar 34,43 persen, sedangkan penduduk yang tamat sampai jenjang perguruan tinggi hanya 5,3 persen (BPS Provinsi NTT, 2015). Ini menunjukkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di NTT belum memadai, karena semakin banyak penduduk berpendidikan rendah semakin tertutup akses untuk mendapat pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan SDM tidak mampu menjawab berbagai kebutuhan dan daya saing yang terjadi pada lingkup regional, nasional, maupun internasional.

Provinsi NTT perlu konsisten dalam meningkatkan APS, AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di NTT

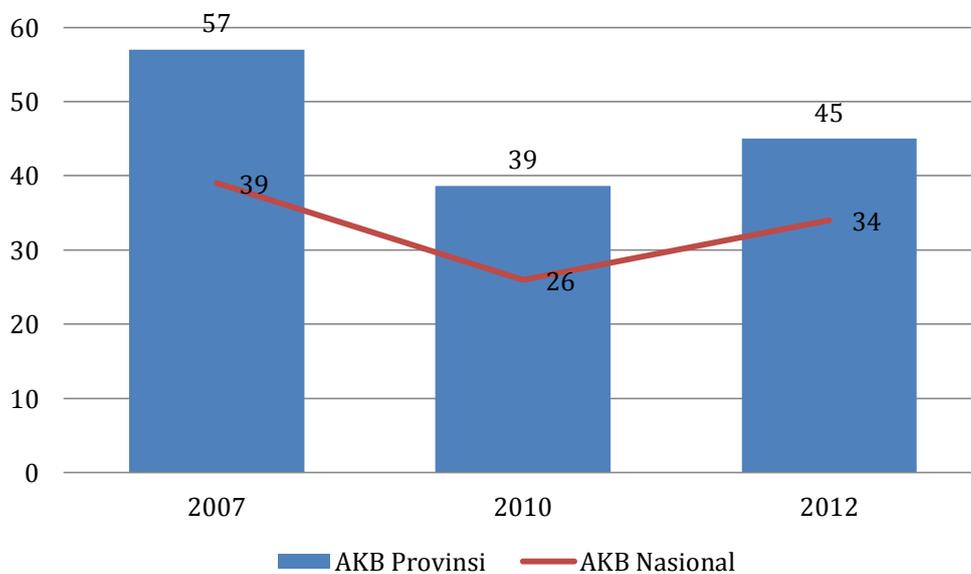
2.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan dan fokus utama pembangunan manusia, karena kesehatan sebagai modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktifitas kehidupannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya, Pemerintah melakukan berbagai program seperti memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dengan penambahan tempat pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Adapun sasaran utama pembangunan kesehatan adalah meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) serta prevalensi gizi buruk dan gizi kurang. Tingkat kesehatan masyarakat NTT belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional. Tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil di NTT disebabkan kurangnya tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil. Rendahnya aksesibilitas antarpulau, tingginya disparitas antarwilayah, serta persebaran penduduk yang tidak merata, membuat

pelayanan kesehatan dengan tenaga yang minim menjadi tidak maksimal dan tidak merata kepada masyarakat.

Peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk tidak terlepas dari pengaruh ketersediaan dan keterjangkauan tenaga kesehatan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketersediaan tenaga kesehatan digunakan rasio dokter; bidan/perawat; dan tenaga kesehatan lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan di NTT masih terbatas dan tidak terdistribusi merata. Jumlah ketersediaan tenaga kesehatan di NTT pada tahun 2014 masih rendah jika dibandingkan jumlah penduduk NTT, yaitu sebesar 1:472 (1 tenaga kesehatan harus melayani 472 orang penduduk). Angka kematian bayi di NTT pada tahun 2012 sebanyak 45 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru (Gambar 10). Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, angka kematian bayi NTT 57 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian balita mencapai 58 kematian per 1000 kelahiran hidup atau turun dari kondisi tahun 2007 sebesar 86 kematian per 1000 kelahiran hidup.

Gambar 10
Angka Kematian Bayi Provinsi NTT



Sumber: BPS, 2012

Pemerintah NTT terus berupaya memperbaiki pelayanan kesehatan dan membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi NTT antara lain program peningkatan sarana prasarana alat RS rujukan regional di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang, RSUD Gabriel manek Kab. Belu, RSUD dr TC. Hilers Kab. Sikka, RSUD Ruteng Kab. Manggarai, serta RSUD Uumbu rara Waingpu Kab. Sumba Timur. Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari program pembangunan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan berhubungan kemudahan penduduk dalam mengakses layanan kesehatan. Pada tahun 2014 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) yang tersedia di NTT sebanyak 44 unit, sebagian besar (12 unit) berada di Kota Kupang. Sebagai rujukan penduduk untuk berobat jalan di Provinsi NTT, jumlah fasilitas kesehatan tertinggi adalah puskesmas. Sampai akhir tahun 2014 jumlah puskesmas di Provinsi NTT terbanyak berada di Kabupaten Timor

Tengah Selatan beserta unit perawatan yang tersedia (Tabel 1). Di tingkat desa/kelurahan ada 2 macam sarana kesehatan yaitu Poskesdes dan poliklinik desa (Polindes). Pada tahun 2014 NTT memiliki 728 poskesdes dan 1.022 polindes. Dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 3.252 berarti di NTT masih banyak desa/kelurahan yang belum memiliki poskesdes dan atau polindes

Tabel 1
Jumlah Puskesmas (Unit) Tahun 2014 Provinsi NTT

No.	Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Perawatan	Puskesmas Non Perawatan
1	Kab. Sumba Barat	7	1	6
2	Kab. Sumba Timur	22	8	14
3	Kab. Kupang	26	8	18
4	Kab. Timor Tengah Selatan	30	9	21
5	Kab. Timor Tengah Utara	26	14	12
6	Kab. Belu	17	2	15
7	Kab. Alor	24	14	10
8	Kab. Lembata	9	2	7
9	Kab. Flores Timur	20	8	12
10	Kab. Sikka	23	9	14
11	Kab. Ende	24	17	7
12	Kab. Ngada	14	3	11
13	Kab. Manggarai	21	6	15
14	Kab. Rote Ndao	12	5	7
15	Kab. Manggarai Barat	15	4	11
16	Kab. Sumba Tengah	8	2	6
17	Kab. Sumba Barat Daya	10	7	3
18	Kab. Nagekeo	7	2	5
19	Kab. Manggarai Timur	22	6	16
20	Kab. Sabu Raijua	6	2	4
21	Kab. Malaka	17	4	13
22	Kota Kupang	10	4	6
Provinsi		370	137	233
Nasional		9.731	3.378	6.336

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2014

Pemerintah telah menyusun beberapa program peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan status kesehatan penduduk khususnya pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin dan menyusui. Pemerintah harus mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan dengan mendistribusikan ke berbagai wilayah termasuk ke daerah terpencil sehingga persalinan balita banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan.

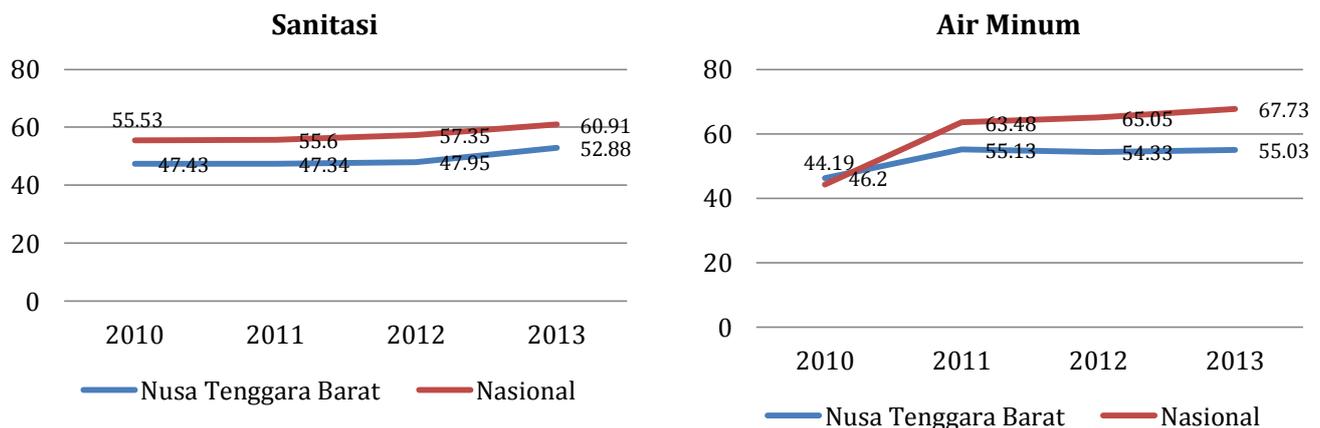
Untuk masalah gizi buruk, penyebab terjadinya gizi buruk di NTT adalah penyakit penyerta seperti infeksi saluran pernafasan, kelainan jantung, dan diare. Sebaran jumlah penduduk yang cukup luas berpengaruh terhadap akses pelayanan kesehatan. Peningkatan

angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

2.1.3. Perumahan

Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kualitas fisik dan fasilitas rumah yang dimiliki dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Rumah tangga sejahtera menempati rumah dengan kualitas yang lebih baik. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah bawah, menempati rumah kualitas layak huni baik segi kesehatan, kenyamanan, maupun keamanan merupakan suatu impian yang sulit diwujudkan. Kebutuhan rumah layak huni di NTT sangat besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang belum tinggal di rumah layak huni karena rendahnya keterjangkauan mereka untuk membangun maupun membeli rumah. Kegiatan pembinaan dan bantuan teknis pembiayaan perumahan bagi masyarakat dapat meningkatkan dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta membina peran swasta juga para pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Gambar 11
Persentase Rumah Tangga Kriteria Kelayakan Sanitasi dan Air Minum



Sumber: BPS, 2013

Pembangunan perumahan yang layak huni juga harus memperhatikan akses air minum dan sanitasi layak. Selama tahun 2010-2013 rumah tangga di NTT yang mendapatkan kriteria kelayakan sanitasi dan kelayakan air minum cenderung meningkat, namun masih berada di bawah nasional (Gambar 11). Kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas sanitasi baik dalam hal pengelolaan air limbah, persampahan, maupun drainase permukiman. Pembangunan sanitasi sangat penting karena berdampak pada kesehatan, kebutuhan infrastruktur permukiman, degradasi lingkungan,

estetika wilayah serta kesejahteraan masyarakat umum. Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menempatkan NTT dalam posisi sebagai 5 provinsi dengan cakupan rumah tangga terendah dalam mengelola air sebelum diminum (33%), rumah tangga tertinggi yang tidak memiliki fasilitas BAB (29,3%), rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja yang tidak aman--SPAL, kolam/sawah, langsung ke sungai/danau/laut, lubang tanah atau ke pantai/kebun--(49,7%) dan rumah tangga dengan akses sanitasi tertendah (41.1%).

Kondisi kelayakan air minum di NTT berada di bawah nasional. Pada tahun 2013 persentase rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di NTT sebesar 55,03 persen, lebih rendah dari persentase nasional sebesar 67,73 persen. Daerah yang rawan air bersih di NTT adalah di Desa Kembang Kerang Daya di Kecamatan Aikmel dan Desa Beriri Jarak di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Daerah ini Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Masalah sanitasi dan air bersih selalu berkaitan dengan beberapa penyakit, misalnya diare, gangguan pencernaan atau Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan pemukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, namun sanitasi sering kali dianggap sebagai urusan sekunder sehingga belum mendapatkan perhatian.

Kondisi perumahan di NTT belum baik apabila dilihat dari komponen penyusun kategori rumah kumuh, yaitu akses minum air tidak layak, akses sanitasi tidak layak, serta kecukupan luas lantai hunian per kapita rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan yang ditentukan pemerintah adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air umum dan pengelolaan sanitasi.

2.1.4. Mental/Karakter

Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan mandiri diperlukan sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki pendidikan yang baik, keahlian dan keterampilan, pekerja keras, memiliki etos kemajuan, bersikap optimis, serta memiliki nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur yang penting ditanamkan untuk mencapai kemandirian tersebut antara lain gotong royong, toleransi, solidaritas, saling menghargai dan menghormati. Negara Indonesia merupakan negara majemuk dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang beragam. Pembangunan mental dan budaya masyarakat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan fisik dan mengatasi permasalahan sosial.

Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilai etis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter mengacu pada kebiasaan berpikir, bersikap, berbuat dan memotivasi kehidupan seseorang. Karakter erat kaitannya pola tingkah laku dan kecenderungan untuk berbuat baik. Dalam hal ini perlu adanya usaha mengadakan pendidikan baik formal maupun informal di lingkungan tempat tinggal untuk menggerakkan perubahan yang terjadi. Pembangunan wilayah NTT menuntut perubahan sikap mental manusia yang selain merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan juga merupakan salah satu tujuan utama pembangunan itu sendiri. Semua elemen masyarakat berperan serta dalam membangun karakter bangsa, di antaranya melalui media massa, pada akademisi, tokoh adat, dan melalui peran organisasi kepemudaan. Proses

penanaman karakter yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah meliputi pengembangan bentuk pembelajaran substantif yang materinya terkait langsung dengan nilai, serta melalui pendidikan keagamaan. Peran lembaga adat juga dapat memberikan pemahaman tentang kearifan lokal yang memiliki nilai positif untuk pembangunan.

Salah satu upaya membentuk karakter masyarakat di NTT adalah melalui pendidikan agama. Sebagian besar penduduk di NTT beragama islam sehingga upaya pembentukan karakter bisa dimulai dari pesantren maupun perkumpulan keagamaan yang lain. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karakter masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan (Tabel 2). Media tempat ibadah dan pendidikan guru agama adalah komponen masyarakat NTT yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan.

Tabel 2
Data Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah di Provinsi NTT Tahun 2014

Agama	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu
Jumlah Umat	4.599.892	17.159	18.079	Data tidak tersedia		
Tempat Ibadah	6.037	87	17	405	49	1

Sumber: Kementerian Agama Kanwil NTT, 2013

Pengembangan mental dan karakter bangsa membutuhkan peran serta masyarakat baik melalui keluarga, organisasi profesi, pengusaha, serta organisasi kemasyarakatan. Adanya keberagaman etnis dan agama dan berkembangnya lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat membutuhkan peran pemuda sebagai aset pembangunan sosial. Untuk menjamin kesejahteraan sosial keterlibatan pemuda dipelukan untuk mendorong proses pembelajaran serta membangun komitmen bersama dalam pembangunan. Pengembangan karakter pemuda dapat dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan karena keterlibatan pemuda dalam hal ini sangat tinggi. Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 sebanyak 10 organisasi, terdiri atas bidang keagamaan, kebangsaan, dan kesiswaan. Organisasi kepemudaan yang terdaftar tersebut merupakan wadah aspirasi generasi muda dalam menjalankan aktivitas kepemudaan (Tabel 3). Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan organisasi kepemudaan adalah adanya sifat dan karakter dari generasi muda yang tidak relevan dengan norma kehidupan masyarakat. Melalui peran organisasi-organisasi ini pengembangan karakter yang positif dapat dilakukan untuk menghindari masalah negatif dalam internal maupun eksternal organisasi. Pemuda memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun daerahnya untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 3
Bidang Organisasi

No.	Bidang	Nama Organisasi
1	Keagamaan	PW. Pemuda Muhammadiyah NTT DPC Himmah NW Mataram PW Fatayat NU NTT

No.	Bidang	Nama Organisasi
		PW GP Anshor NTT
2	Kebangsaan	Purna Paskibraka Indonesia NTT Purna Caraka Muda Indoensia NTT DPW Pemuda Pancasila DPD Pemuda Demokrat Indonesia NTT
3	Kesiswaan	DPD Gerakan Mahasiswa Kasgoro PC HMI Mataram

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2014

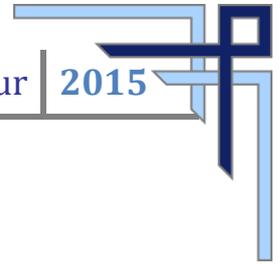
2.2. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

2.2.1. Pengembangan Sektor Pangan

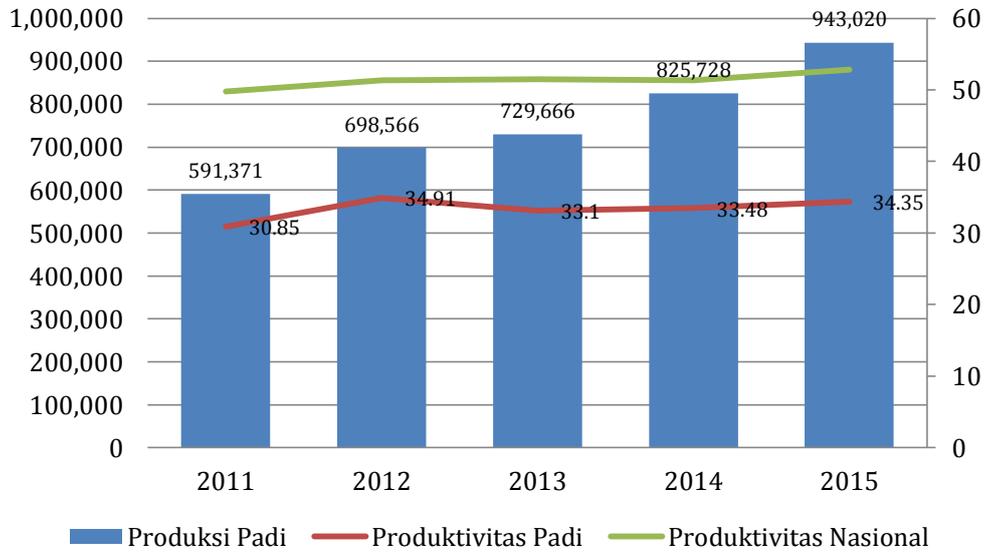
Pemenuhan kebutuhan pangan harus diarahkan agar dapat diproduksi secara mandiri di setiap wilayah sehingga terwujud sistem kemandirian pangan. Kemandirian pangan akan mampu menjamin masyarakat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan tanpa ketergantungan dari pihak luar. Pengembangan sektor pangan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan lahan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan yang didominasi bahan pangan tertentu (beras) menyebabkan ketergantungan tinggi yang dapat mengancam kedaulatan pangan. Hal ini akan berbeda apabila bahan makanan tersebut dapat dihasilkan dari hasil budidaya mandiri di suatu wilayah.

Pengusahaan tanaman pangan bertujuan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dengan gizi yang cukup bagi penduduk untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan perubahan pola makan penduduk di NTT maka ketersediaan pangan harus ditingkatkan, baik dalam jumlah, kualitas maupun keragamannya. Terkait dengan hal ini, maka masalah utama pembangunan pangan di NTT adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya domestik dan peningkatan kapasitas produksi pangan daerah agar produksi pangan domestik dapat tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan pangan yang meningkat. Kendala yang dihadapi pada pengembangan tanaman pangan di NTT adalah masalah kekeringan atau pasokan air yang tidak menentu

Untuk merealisasikan program pemerintah mengenai ketahanan pangan di NTT masyarakat didorong untuk meningkatkan pencapaian produksi bahan pangan seperti padi, jagung, maupun kedelai. Padi merupakan bahan makanan utama di NTT. Produksi padi di Provinsi NTT cenderung meningkat selama 2011 – 2015 (Gambar 12). Pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan sebesar 3,51 persen atau 77.061 ton. Hal ini sejalan dengan penurunan luas panen padi yaitu sebesar 0,99 persen atau 4.345 ha. Selama sepuluh tahun terakhir produksi padi di NTT cenderung meningkat 4,95 persen per tahun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produktivitas sebesar 1,31 persen dan luas panen 3,43 persen.

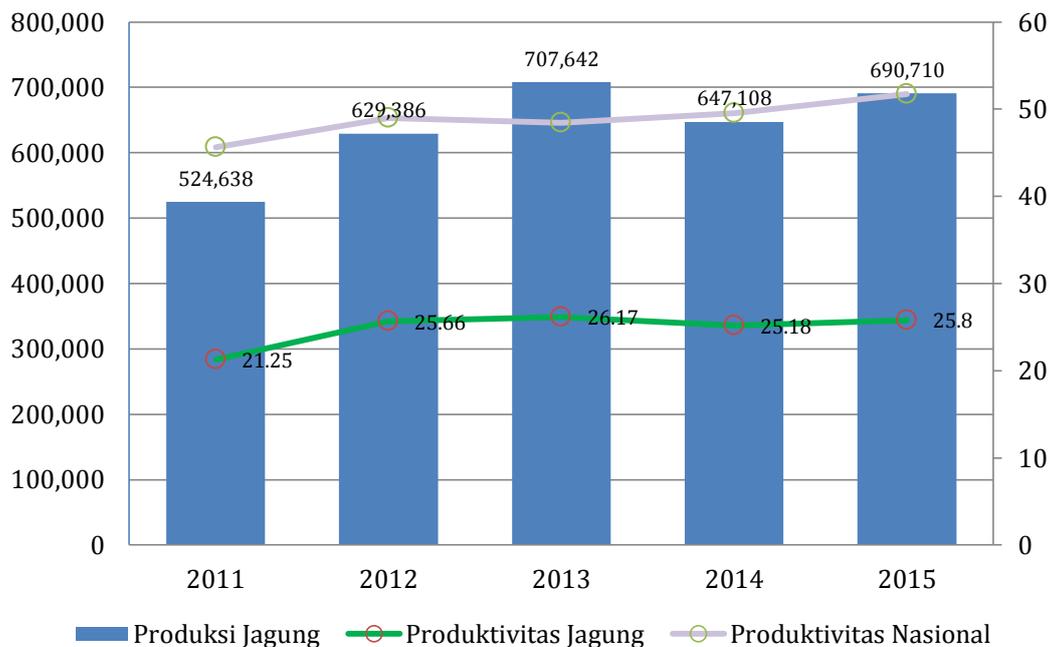


Gambar 12
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Padi Provinsi NTT



Sumber: BPS, 2015

Gambar 13
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Jagung Provinsi NTT



Sumber: BPS, 2015

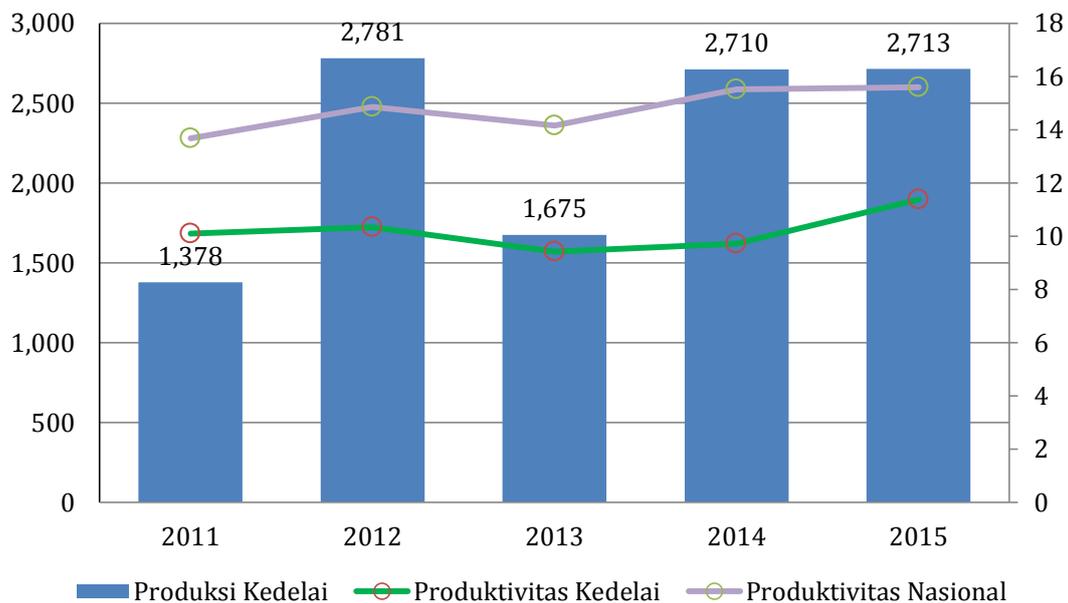
Produksi padi di NTT pada 2015 sebesar 943.020 ton gabah kering giling atau meningkat 13,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan karena



luas panen padi pada musim tanam tahun ini meningkat sebesar 8,97 persen dan produktivitas juga meningkat hingga 4,80 persen. Untuk memenuhi target panen padi NTT telah memiliki sejumlah sentra produksi padi. Secara akumulatif target tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan lahan seluar 126.000 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Di Kabupaten Manggarai panen padi mencapai 9,6 ton/hektar pada tahun 2015. Pemerintah juga mengupayakan pembangunan infrastruktur dan perbaikan di bidang pengairan, seperti irigasi terseier, waduk, dan bendungan. Bantuan peralatan pertanian seperti mesin giling, mesin perontok, traktor, dan pompa air juga diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi.

Peningkatan produksi jagung dan kedelai juga menjadi prioritas pemerintah Provinsi NTT. Produksi dan produkstivitas jagung di Provinsi NTT selama tahun 2011-2015 berfluktuatif dan mencapai produksi tertinggi pada tahun 2012, yaitu sebesar 707.642 ton (Gambar 13). Pada tahun 2014 dan tahun 2015 produksi dan produktivitas jagung kembali meningkat namun peningkatannya belum sebesar produksi pada tahun 2012. Produksi jagung tahun 2015 sebanyak 690.710 ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebesar 43.602 ton (6,74 persen) jika dibanding tahun 2014 sebesar 647.108 ton pipilan. Jagung merupakan produksi andalan di NTT, kenaikan produksi pada tahun 2015 terjadi karena produktivitas dan luas panen meningkat.

Gambar 14
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Kedelai Provinsi NTT



Sumber: BPS, 2015



Untuk komoditas kedelai, kontribusi produksi kedelai di NTT tidak sebesar jagung dan padi (Gambar 15). Produksi kedelai tahun 2015 sebanyak 2.713 ton biji kering meningkat sebanyak 3 ton (0,01 persen) dibanding tahun 2014 sebanyak 2.710 ton biji kering. Naiknya produksi kedelai disebabkan bertambahnya luas panen dan meningkatnya produktivitas. Daerah yang potensial untuk pengembangan kedelai di NTT adalah di Pulau Flores. Kendala yang dihadapi pada pengembangan kedelai adalah tingkat curah hujan yang rendah serta kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Agar mencapai produktivitas tinggi petani perlu memperhatikan pengolahan tanah, pola tanam, dan manajemen organisme pengganggu tanaman.

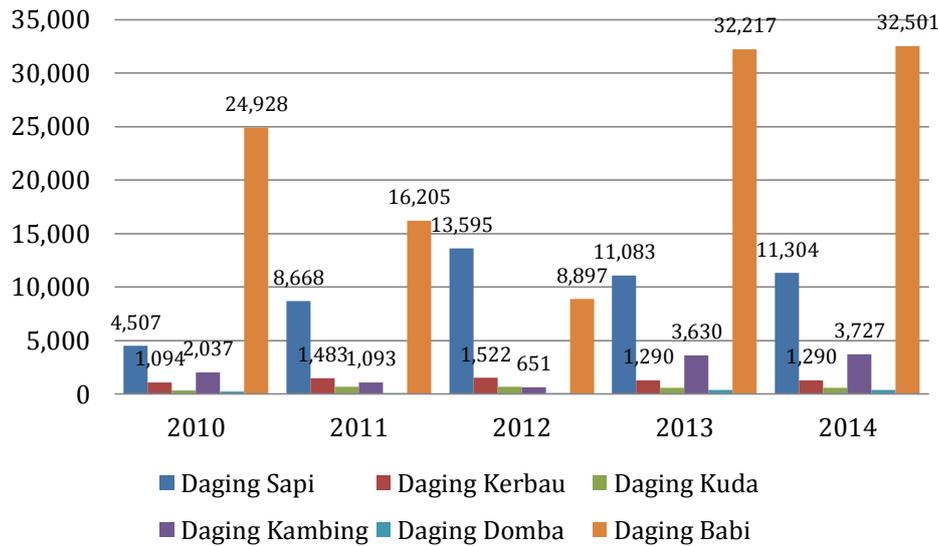
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di NTT peningkatan luas lahan pertanian diperlukan untuk menjamin stabilitas dan ketahanan pangan. Provinsi NTT memiliki potensi lahan kering yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif lahan produksi pangan. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha pertanian di lahan kering antara lain kesuburan tanah di lahan kering relatif rendah, akses irigasi terbatas, serta biaya pengelolaan lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian konvensional. Upaya ketahanan pangan yang didukung dengan dana APBN perlu disalurkan ke petani dalam bentuk bantuan sosial untuk memilih bibit unggul, pupuk, perbaikan irigasi, serta pemberian alat mesin pertanian sehingga petani mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanamnya.

NTT merupakan salah satu provinsi yang menjadi sentra produksi ternak di Indonesia. Daerah yang banyak mengusahakan ternak di NTT terdapat di Pulau Timor, Flores, Sumba dan Alor yang memiliki lahan bahan pakan ternak berupa padang savanna luas, serta terdapat berbagai jenis rumput yang bergizi tinggi. Kondisi ini merupakan potensi NTT untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan ketahanan pangan. Prospek pengembangan peternakan sapi di NTT cukup baik dengan ditunjang populasi yang besar, ketersediaan lahan dan pakan ternak, budaya masyarakat, serta potensi pasar yang masih terbuka.

Produksi daging di Provinsi NTT cukup besar, dengan produksi tertinggi pada tahun 2014 adalah daging babi (Gambar 16). Populasi ternak di NTT juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan populasi ternak besar di NTT adalah sapi, kambing, dan kuda namun produksi daging terbesar adalah daging babi, sapi, dan kerbau. Di tingkat nasional NTT menjadi salah satu daerah peternak sapi merupakan sumber ternak bibit dan ternak potong nasional. Pengembangan komoditas sapi di daerah NTT diharapkan menjadi salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan komoditas ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha dengan berbagai alternatif investasi diantaranya usaha perbibitan sapi, usaha penggemukan sapi, usaha campuran dan pembibitan, dan usaha peternakan hilir.



Gambar 15
Produksi Daging Provinsi NTT (Ton)

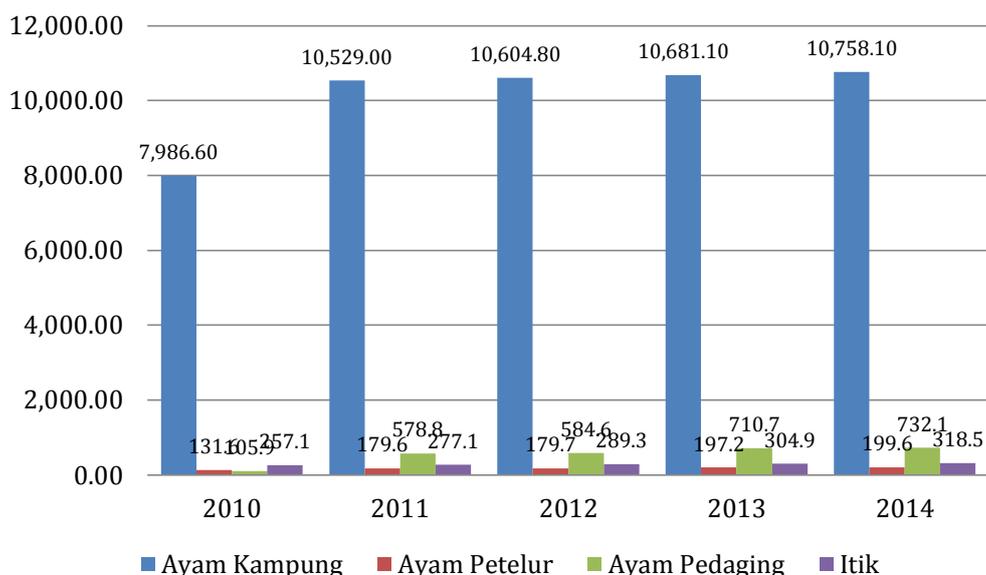


Sumber: BPS, 2014

Peternakan unggas di Provinsi NTT populasinya juga terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah populasi ternak unggas terbesar di NTT adalah ayam kampung yaitu sebanyak 10,8 juta ekor pada tahun 2014, sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 10,7 juta ekor (Gambar 16). Walaupun memiliki populasi yang tinggi perkembangan ayam kampung di NTT masih menemui beberapa kendala, diantaranya pertumbuhan yang cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan ayam pedaging (mampu panen dalam waktu 40 hari), kesulitan memperoleh bibit, resiko kematian mencapai 10 – 20 persen pada bulan-bulan awal ternak, penyakit dan hama dan juga terjadinya penurunan kualitas yang diakibatkan kekeliruan dalam proses produksi.

Untuk mendukung peternakan ayam di NTT dibutuhkan beberapa faktor yang saling berhubungan seperti ketersediaan sumberdaya dan potensi wilayah, kebutuhan pasar, skala usaha dan pola pemeliharaan, serta kelembagaan dan perkreditan. Di Nusa Tenggara Timur walaupun jenis usaha ternak ini telah lama berkembang, namun masih banyak kendala yang bersifat spesifik, misalnya pemeliharaan bersifat ekstensif, kurang tersedia bibit unggul, rendahnya kemampuan peternak dalam mengidentifikasi penyakit, keterbatasan penyediaan pakan serta kurang menguasai pemasaran dan pengolahan hasil. Oleh karena itu diperlukan dukungan penuh pada peternakan unggas guna memenuhi konsumsi daging dan hasil lainnya.

Gambar 16
Populasi Ternak Unggas Provinsi NTT (Ribu Ekor)



Sumber: BPS, 2014

Tercapainya kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi NTT juga dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan peternak. Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat sementara peningkatan produksi pangan dan produktivitas hasil pertanian juga terus diupayakan. Pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah lahan pertanian dengan memfungsikan kembali lahan sawah untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan musimnya. Ketersediaan lahan di NTT cukup luas untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi tanaman pertanian dan kebutuhan pangan lainnya. Pemerintah berupaya melakukan pembukaan lahan pertanian dalam memenuhi target produksi tanaman pangan di tahun 2019 (Tabel 4).

Tabel 4
Sasaran Kedaulatan Pangan Provinsi NTT

Desa Mandiri Benih	Cetak Sawah (Ha)	Target Produksi 2019 (ribu ton)			
		Padi	Jagung	Kedelai	Daging Sapi dan kerbau
35	47.000	867.927	996.407	5.964	20.660

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2015

Dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Dinas pertanian perlu memantau penyaluran benih dan pupuk agar lahan sawah bisa diusahakan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman

pangan. Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam mengakses sarana produksi, sumber permodalan, pengolahan hasil serta pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.

2.2.2. Pengembangan Sektor Energi

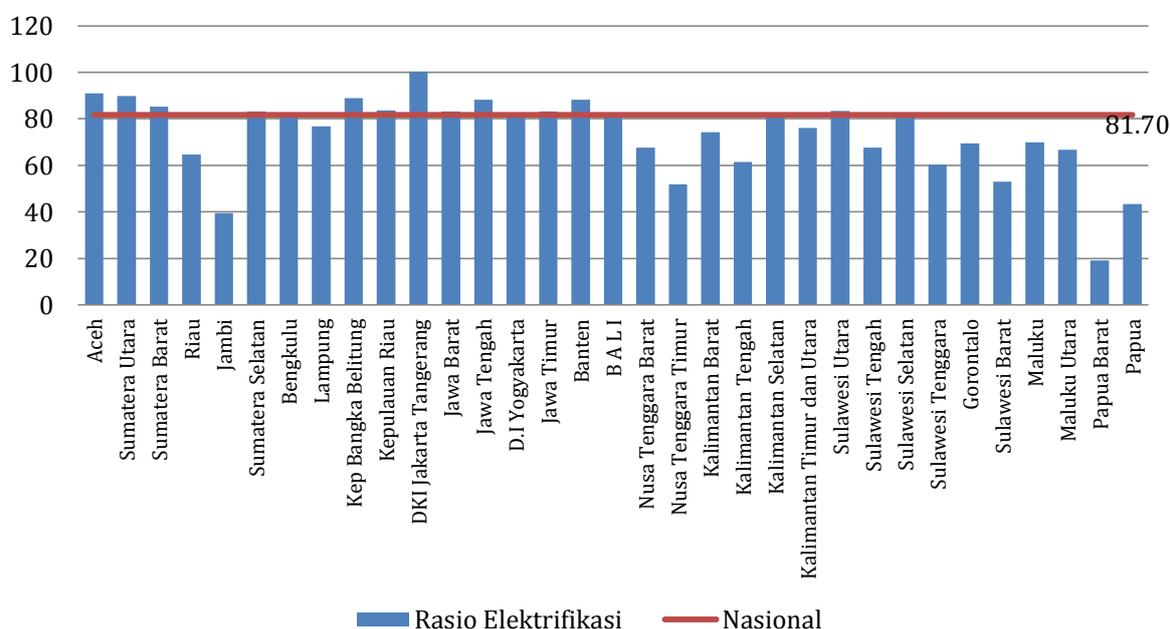
Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum begitu menggembirakan. Potensi energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, angin, surya, samudera, maupun biomassa jumlahnya cukup memadai namun tersebar. Selain itu terdapat sumberdaya energi terbarukan yang belum banyak diketahui masyarakat umum adalah energi laut dan samudra. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi kinetik yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya serta energi potensial dari tinggi rendahnya ombak. Potensi energi gelombang laut Indonesia relatif cukup tinggi dan terdapat di wilayah sisi barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, NTT, dan NTT.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang tidak memiliki sumber potensi energi fosil dan sangat bergantung pada pasokan energi dari daerah lain. Saat ini konsumsi energi khususnya jenis energi bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui juga menimbulkan persoalan tersendiri. Permasalahan di atas hanya mungkin dapat diatasi dengan melakukan diversifikasi sumber energi baik menyangkut jenis maupun jumlahnya melalui pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif, khususnya sumber energi terbarukan (*renewable energy*). Sumber energi terbarukan ini cukup besar di Indonesia, seperti sinar surya, angin, air, gelombang laut, biomassa (limbah), panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), dsb. Upaya mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan ini diharapkan dapat menutupi fenomena *excess demand* of energi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan diversifikasi ini semakin dirasakan urgensinya seiring dengan semakin menipisnya sumber energi konvensional, dan tuntutan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan.

Dalam rangka mempercepat diversifikasi energi khususnya dalam pembangkitan tenaga listrik, pemerintah melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan seperti air dan panas bumi, angin dan lain-lain sebagai sumber energinya. Potensi sumber kelistrikan di NTT antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang terletak di tiga lokasi, meliputi Desa Aeu'ut Pulau Timor Kabupaten Timor Tengah Selatan, Desa Wini Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Humbapraing Waingapu Pulau Sumba

Kabupaten Sumba Timur. Potensi angin di NTT sangat besar karena topografi daratan berbukit-bukit dan ladang savana. Di NTT juga terdapat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dayanya cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTT. PLTS ini terletak di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang NTT, dengan kapasitas 5MWp .

Gambar 17
Rasio Elektrifikasi (%) Tahun 2014



Tidak termasuk pelanggan non PLN

Sumber: Statistik PLN, 2014

Penempatan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan di kabupaten dan kota Provinsi NTT perlu diprioritaskan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi di Provinsi NTT tahun 2014 masih di bawah 100 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 81,70 persen (Gambar 17). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015-2024). Rasio elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Terbatasnya pasokan listrik di NTT menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir yang mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Data Susenas 2014 menunjukkan sampai dengan tahun 2014 rumah tangga pengguna listrik PLN di NTT sebesar 65,47 persen, dengan persentase terbesar di Kota Kupang sebesar 98.202 pelanggan dan pengguna listrik PLN paling rendah ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 14.102. Jika dilihat dari jenis bahan bakar untuk penerangan rumah, masih banyak terdapat rumah tangga di NTT yang menggunakan sumber penerangan pelita maupun obor, yang menunjukkan belum terjadi pemerataan pembangunan kelistrikan di seluruh wilayah NTT

Pengembangan kelistrikan di NTT terus ditingkatkan karena wilayah ini masih mengalami defisit listrik. Penyediaan pasokan listrik dengan sumber energi terbarukan di NTT yang memadai akan memacu berkembangnya usaha mikro dan kecil di masyarakat seperti

usaha makanan rumah tangga, usaha jasa percetakan, usaha kerajinan kerang, usaha warung internet, dan usaha-usaha lainnya. Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, ketika NTT sudah siap dengan infrastruktur kelistrikan yang lebih lengkap dan modern berbasis sumber energi terbarukan, diharapkan banyak investor yang datang dalam berbagai industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti industri pengolahan ikan dan industri pariwisata..

2.2.3. Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan

Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termemanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas laut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, wilayah dengan potensi maritim besar perlu didorong untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Kondisi Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di NTT. Di Provinsi NTT terdapat rencana pembangunan pelabuhan untuk tol laut, yaitu di Tenau Kota Kupang. Untuk pembangunan dermaga sesuai sasaran pembangunan dalam RKP 2016 dilakukan di 2 lokasi, meliputi Raijua dan Wairian.

Sebagai wilayah kepulauan sarana transportasi laut sangat dibutuhkan masyarakat, Armada laut ini memiliki kapasitas daya angkutnya yang besar, murah dan dapat menembus daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau. Ada 2 macam armada laut yang melayani masyarakat di wilayah NTT yaitu kapal ferry dan kapal laut. Perbedaannya, kapal ferry atau dikenal juga sebagai kapal penyeberangan, umumnya hanya melayani angkutan antar pulau dalam wilayah NTT sedang kapal laut jangkauannya lebih luas hingga luar provinsi. NTT memiliki 17 pelabuhan laut, rata-rata jumlah aktivitas penumpang terbesar di Pelabuhan Tenau sebanyak 202.035 orang (Tabel 5).

Tabel 5
Aktivitas di Pelabuhan Provinsi NTT

Pelabuhan Laut	Rata-rata Jumlah Penumpang (orang)	Bongkar Muat Barang (ton)
Laurens Say	61.115	77.846.132
Waingapu	32.839	374.616
Waikelo	31.545	16.057
Seba	23.044	26.142
Ba'a	55.370	11.218
Marapokot	1.465	22.567
Reo	4.332	158.141
Labuan Bajo	83.572	34.250
Komodo	5.028	
Larantuka	42.247	1.487.326
Tobilota	6.805	1.866
Mananga	604	1.260
Atapupu	Data tidak tersedia	
Wini	2.057	7.463
Iewoleba	23.907	19.541
Balauring	25	170

Tenau	202.035	444.392
Total	575.990	80.451.141

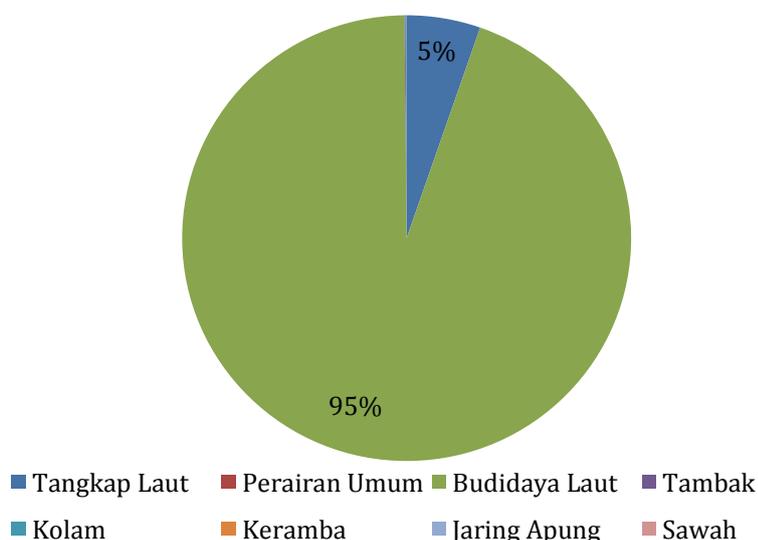
Sumber: BPS NTT, 2014

NTT juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Sumber daya laut di NTT sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan di NTT pada tahun 2013 didominasi oleh perikanan budidaya laut sebesar 1.846.350 ton (gambar 20). Jenis perikanan lain hasil produksinya sangat kecil dibandingkan perikanan laut. Perkembangan perikanan didukung potensi panjang garis pantai \pm 5.700 Km dan luas laut mencapai 15.141.773,10 hektar. Potensi yang mendukung sektor perikanan di NTT adalah hutan mangrove seluas 51.854,83 hektar (11 Spesies), terumbu karang sebanyak 160 jenis dari 17 famili, 42.685 rumah tangga perikanan, 808 desa dan kelurahan pantai, jumlah 1.105,438 jiwa penduduk pantai, 194,684 orang nelayan (9,9 % dari jumlah Penduduk Desa Pantai)

Potensi budidaya, terdiri dari budidaya laut seluas 5.870 hektar (rumput laut, mutiara, kerapu) dengan potensi produksi mencapai 51.500 ton per tahun; budidaya air payau seluas 35,455 hektar (udang dan bandeng) dengan potensi produksi mencapai 36.000 ton per tahun; budidaya air tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 hektar dengan potensi produksi mencapai 1,297 ton per tahun dan mina padi seluas 85 hektar dengan potensi produksi mencapai 85 ton per tahun. Potensi Perikanan tangkap, terdiri dari potensi lestari sebesar 388,7 ton per tahun terdiri dari pelagis (tuna, cakalang, tenggiri, laying, selar, kembung, ikan demersal (kerapu, ekor kuning, kakap, bambangan, serta komoditi lainnya (lobster, cumi-cumi, kerang darah, dll).

Arah pengembangan sumber daya laut untuk perikanan tangkap dan budidaya di NTT meliputi: (1) kawasan peruntukan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar di seluruh kabupaten dan kota; (2) pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Suba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang; dan (3) pengembangan komoditas garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Kupang Tengah Utara, Kupang, lembata, dan Alor.

Gambar 18
Produksi Perikanan (ton) Provinsi NTT Tahun 2013



Sumber: BPS, 2013

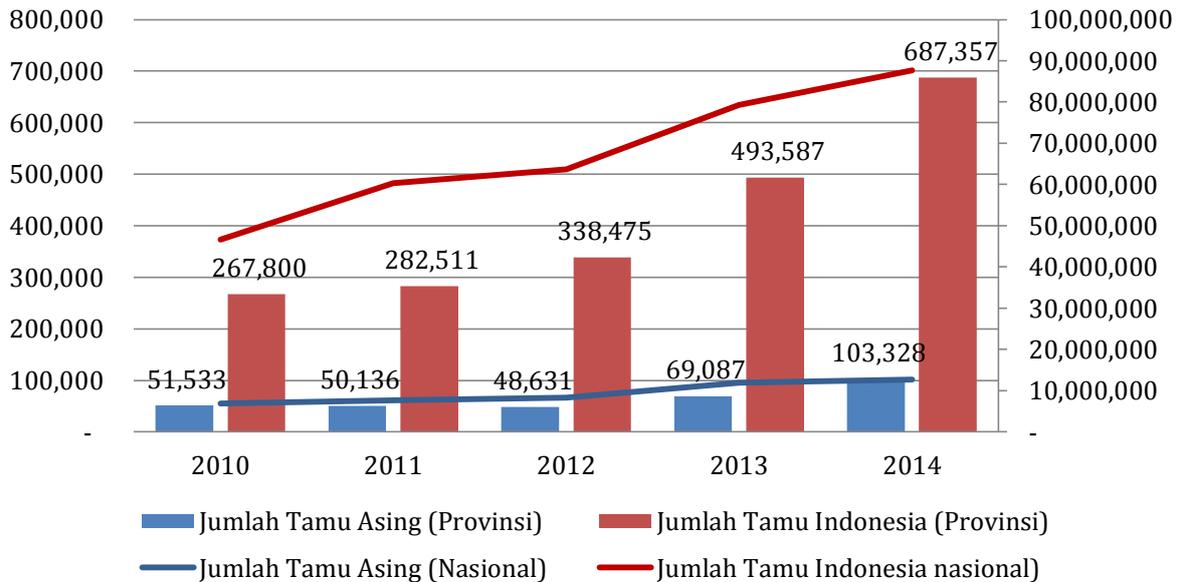
Produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya terus mengalami peningkatan, dengan kontribusi tertinggi disumbangkan oleh perikanan budidaya. Perkembangan jumlah kapal penangkapan ikan serta luas lahan untuk usaha budidaya juga terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya perkembangan pembangunan perikanan dan kelautan.

2.2.4. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri

Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat karena sektor pariwisata dan industri merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor industri meliputi pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas.

Pesona keindahan alam serta keunikan budaya yang dimiliki Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata yang diminati oleh wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Perkembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di NTT mengalami peningkatan secara bertahap seiring dengan dilakukannya berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata baik berskala nasional maupun internasional. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di NTT juga meningkat setiap tahunnya, Hal ini juga terlihat dari jumlah tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi NTT dibandingkan Indonesia secara keseluruhan Tahun 2010-2014 (Gambar 19). Rata-rata jumlah tamu asing dan domestik pada hotel dan akomodasi lain di NTT sebesar 500 ribu orang pengunjung selama tahun 2010-2014. Penyebaran lokasi hotel di NTT masih belum merata, yaitu sebagian besar berada di Kota Kupang (19,5 persen), Manggarai Barat (15,41 persen), dan Sikka (9,75 persen) sementara masih ada kabupaten yang tidak memiliki fasilitas hotel yaitu Kabupaten Sumba Tengah.

Gambar 19
Jumlah Tamu yang Menginap Tahun 2010-2014



Sumber: BPS, 2014

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata, kesenian dan budaya. Untuk itu, perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha pariwisata maupun lembaga terkait untuk upaya pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur mendorong sektor pariwisata untuk menjadi sektor unggulan, dengan terus mempromosikan keragaman wisata daerah ini melalui media massa. Jika pariwisata dijadikan sebagai sektor unggulan, maka sektor-sektor lainnya juga tumbuh menyertainya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk sektor industri, pembangunan sektor industri bukan hanya membangun pabrik dan memasarkan hasil produksinya namun membangun sistem untuk berkembang secara mandiri pada struktur ekonomi masyarakat setempat. Salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.

Peran sektor industri pada pembentukan PDRB NTT tidak dominan karena kontribusi terbesar perekonomian adalah pada pertanian dan jasa-jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian sebesar 1,42 persen, mengindikasikan ketergantungan NTT terhadap suplai produk olahan dari daerah lain sangat tinggi. Oleh karena itu, industri pengolahan berbasis pengembangan sumberdaya alam perlu ditingkatkan dengan optimalisasi potensi alam NTT. Dengan berkembangnya sektor industri, aktivitas di sektor-sektor lain akan turut meningkat karena sektor industri membutuhkan pasokan bahan baku baik dari sektor

pertanian maupun dari sektor lainnya, termasuk hasil dari sektor industri itu sendiri. Naik turunnya sektor industri akan mempengaruhi sektor lainnya.

Industri yang berkembang di NTT terdiri atas industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, industri furniture, dan industri barang galian bukan logam. Industri tersebut merupakan industri besar dan sedang. Sebagian besar perusahaan industri sedang besar di NTT berusaha di bidang industri makanan dan yang paling sedikit adalah industri tekstil dan industri barang galian bukan logam.

Pada tahun 2014 jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang aktif di Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 33 unit, hanya bertambah 4 perusahaan/usaha dari tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sektor industri besar sedang menunjukkan kenaikan dari 1.681 pekerja pada tahun 2012 menjadi 1.985 pekerja pada tahun 2014 (Tabel 6). Jika dilihat dari besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan di sektor industri, terlihat bahwa kinerjanya menunjukkan perbaikan, meskipun belum mampu menaikkan nilai kontribusinya dalam struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur. Nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan pada tahun 2014 mencapai 843,71 milyar rupiah, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 758,82 milyar rupiah.

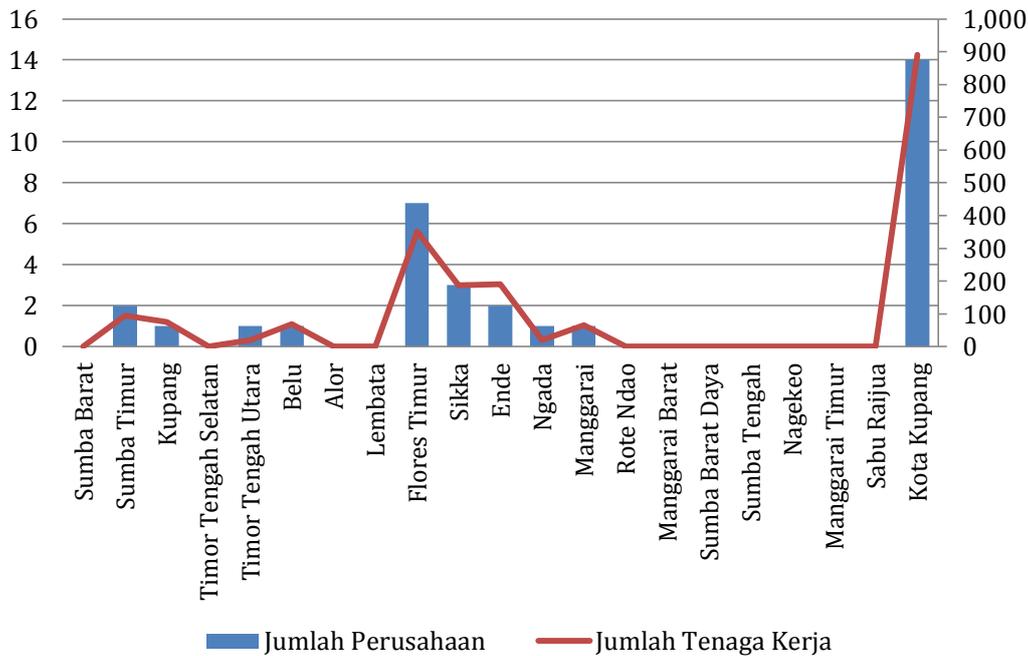
Tabel 6
Profil Usaha Sektor Industri Besar Sedang di NTT

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Perusahaan	24	29	33
Jumlah tenaga kerja	1.681	1.898	1.965
Nilai Tambah PDRB Industri (Juta Rp)	686.717	758.818	843.707
Kontribusi Sektor Industri (persen)	1,25	1,24	1,23

Sumber: Statistik Daerah Provinsi NTT, 2015

Potensi sumberdaya alam NTT yang besar dalam perekonomian harus berimbang pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan industri rakyat. Peranan sektor industri belum begitu besar dalam PDRB NTT karena kegiatan sektor ini di Provinsi NTT masih didominasi oleh kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang masih sulit berkembang di daerah ini. Industri di NTT kurang berkembang karena kurangnya akses pasar dan sumber dana modal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan ketertinggalan dalam segi teknologi dan manajemen. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut, kualitas produk juga relatif rendah sehingga permintaan juga rendah. Karena harga jual yang ditawarkan dari produk industri relatif murah dan mampu dijangkau semua kalangan masyarakat, industri kecil tetap bertahan dalam perekonomian NTT. Pengembangan industri rakyat dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Tidak seluruh kabupaten dan kota di NTT memiliki usaha industri dalam perekonomiannya. Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri di NTT hanya sebanyak 33 perusahaan dengan jumlah total tenaga kerja sebanyak 1.965 pada tahun 2014 (Gambar 20). Jumlah perusahaan terbanyak yang mengusahakan industri terdapat di Kota Kupang sebanyak 14 perusahaan, begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja terbesar sebanyak 895 orang. Daerah yang tidak memiliki industri di NTT meliputi Kabupaten Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua.

Gambar 20
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Formal dan Non Formal NTT Tahun 2014



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2015

Industri pengolahan berbasis pengembangan sumberdaya alam perlu ditingkatkan dengan optimalisasi potensi alam NTT. Dengan wilayah laut yang luas, potensi industri garam bisa dikembangkan di NTT, meliputi Kabupaten Nagekeo, Ende, Kupang, Sumba, dan Rote. Wilayah NTT memiliki potensi areal lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertambangan garam yang potensial. Luas lahan keseluruhan seluas 8.953,25 Ha dan luas yang telah dieksploitasi seluas 151 hektar. NTT memiliki musim kemarau yang relatif lebih panjang antara 7-8 bulan dalam setahun sehingga mampu meningkatkan produksi garam yang ditargetkan sampai 1,3 juta ton per tahun (Bank Indonesia, 2015)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha kecil dan mikro yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal yang rendah, modal usaha yang belum tersedia, kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UKM, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

2.3. ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2.3.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan

sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota.

2.3.1.1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang mencakup dalam wilayah hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Provinsi NTT diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing daya saing nasional dan internasional berbasis pengembangan industri MICE, serta pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga. Sesuai RKP 2016 belum ada penetapan kawasan ekonomi khusus di NTT namun terdapat kawasan pembangunan kawasan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Kawasan Mbay. Selain itu Kota Kupang diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa

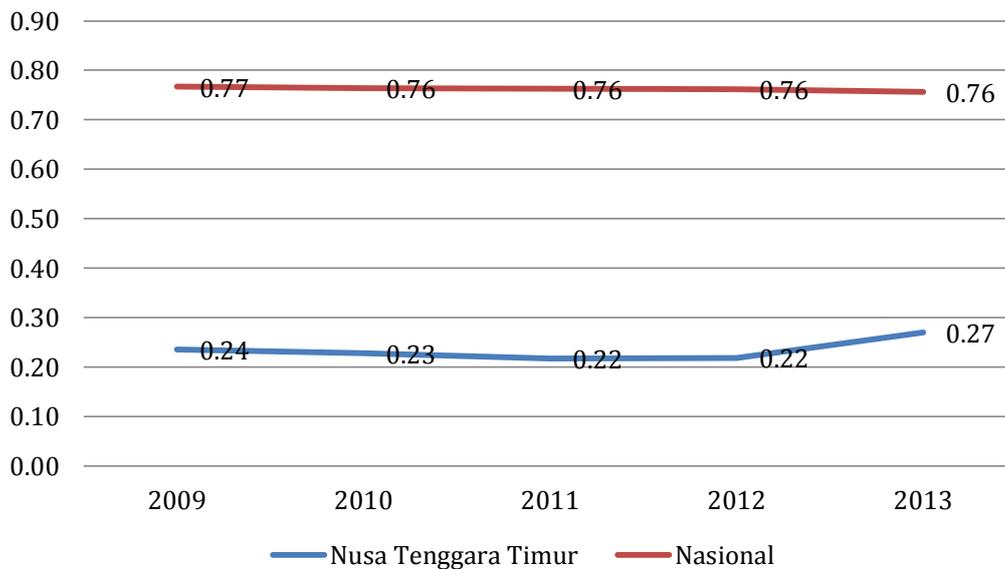
2.3.1.2. Kawasan Industri

Provinsi NTT belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di NTT saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Dengan dikembangkannya industri di kawasan timur Indonesia dapat sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional dan pemerataan industri yang selama ini terpusat di Pulau Jawa

2.3.2. Kesenjangan intra wilayah

Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antargolongan pendapatan. Tingkat kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota di Provinsi NTT yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cenderung menurun, namun pada tahun 2014 meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan di NTT tergolong kesenjangan ekonomi yang berkategori rendah (Gambar 23). Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di NTT adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. NTT dengan karakteristik kepulauan membutuhkan biaya pembangunan lebih besar untuk membangun infrastruktur penunjang seperti transportasi dan energi.

Gambar 21
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Pembangunan di NTT dengan karakteristik kepulauan membutuhkan penanganan yang berbeda karena dibutuhkan biaya besar terkait pembangunan infrastruktur penunjang seperti transportasi, energi, dan komunikasi. Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 7). Karakteristik daerah kepulauan mengakibatkan banyak warga yang sukar dicapai oleh sarana dan prasarana sosial ekonomi. Keterbatasan jalan membuat warga sukar untuk saling berhubungan dan memperoleh pelayanan yang seharusnya disediakan pemerintah. Kota Kupang sebagai ibukota provinsi memiliki PDRB per kapita tinggi, jauh meninggalkan daerah lain di provinsi ini. Kota Kupang terus berkembang menjadi pusat lalu lintas barang, layanan jasa, serta pusat pengembangan wilayah NTT.

Tabel 7
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2008-2013 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumba Barat	5.164	5.766	6.431	7.179	8.022	8.945
Sumba Timur	5.342	5.812	6.441	7.173	7.948	8.751
Kupang	5.183	5.811	6.903	7.665	8.430	9.091
Timor Tengah Selatan	4.100	4.545	5.041	5.705	6.429	7.198
Timor Tengah Utara	3.341	3.663	4.047	4.454	4.914	5.335
Belu	4.435	6.940	7.505	5.535	6.025	7.094
Alor	3.574	3.905	4.378	4.884	5.413	6.013
Lembata	2.782	3.081	3.459	3.879	4.326	4.875
Flores Timur	4.939	5.419	6.042	6.634	7.261	8.053
Sikka	4.532	4.952	5.519	6.152	6.775	7.487

Kab/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ende	5.236	5.826	6.528	7.312	8.287	9.325
Ngada	5.400	5.947	6.667	7.305	8.024	8.889
Manggarai	3.444	3.828	4.199	4.646	5.134	5.704
Rote Ndao	4.229	4.533	4.949	5.259	5.512	5.893
Manggarai Barat	3.944	4.255	4.556	4.843	5.203	5.679
Sumba Barat Daya	2.630	2.920	3.250	3.659	4.094	4.634
Sumba Tengah	3.716	4.187	4.782	5.360	5.986	6.635
Nagekeo	4.507	4.875	5.332	5.873	6.501	7.221
Manggarai Timur	2.796	3.074	3.412	3.828	4.337	4.927
Sabu Raijua	-	-	4.427	5.157	5.951	6.446
Malaka	-	-	-	-	-	6.070
Kota Kupang	11.333	12.319	13.847	15.413	17.163	19.730
Nusa Tenggara Timur	4.804	5.239	5.896	6.519	7.236	8.168

Sumber: BPS, 2013

3. ISU STRATEGIS WILAYAH

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki kriteria yaitu: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Berdasarkan gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka isu-isu strategis Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian)

Struktur perekonomian NTT tahun 2014 didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pembangunan di wilayah ini fokus pada sektor ekonomi unggulan seperti perikanan, pertanian, perkebunan yang merupakan motor penggerak utama, pertumbuhan perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan hanya berperan di bawah 2 persen, dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya (Tabel 8). Sektor pertanian didominasi oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di wilayah ini.

Tabel 8
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2010
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,80	28,85
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,56	1,44
3.	Industri Pengolahan	1,23	1,25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,07	0,07
6.	Konstruksi	10,34	10,60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,62	11,30
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,20	4,99

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2010
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,59
10.	Informasi dan Komunikasi	7,48	8,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,96	3,83
12.	Real Estate	2,71	2,59
13.	Jasa Perusahaan	0,31	0,29
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	12,14	12,54
15.	Jasa Pendidikan	9,57	8,82
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,06	2,12
17.	Jasa Lainnya	2,18	2,17
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2014

Apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan analisis sektor basis, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), dengan nilai *location quotient* lebih besar dari satu ($LQ > 1$). Hal ini menunjukkan Provinsi NTT memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut (Tabel 9). Sebaliknya, kelompok sektor industri pengolahan memiliki nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$), yang menunjukkan peluang dan potensi Provinsi NTT untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan (pertanian, pertambangan, dan jasa) tersebut. Provinsi NTT perlu mengembangkan subsektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah.

Tabel 9
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi NTT

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	2,24	2,23	2,20	2,20
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16
3.	Industri Pengolahan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,20	0,21	0,22	0,24
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,81	0,82	0,84	0,86	0,87
6.	Konstruksi	1,09	1,12	1,11	1,10	1,09
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	0,81	0,80	0,81	0,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,38	1,36	1,33	1,33	1,32
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19
10.	Informasi dan Komunikasi	2,11	2,04	1,96	1,89	1,85
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	0,98	0,99	1,02	1,04
12.	Real Estat	0,93	0,92	0,92	0,91	0,87
13.	Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,15	3,22	3,36	3,56	3,61
15.	Jasa Pendidikan	2,92	2,86	2,81	2,81	2,77
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22	2,16	2,12	2,11	2,01
17.	Jasa lainnya	0,85	0,82	0,80	0,78	0,76

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2010

Sumber: BPS, 2014(diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di NTT, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian karena kontribusi sektor primer ini cukup tinggi untuk perekonomian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. *Kedua*, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja. Keberadaan operasi pertambangan konsentrat tembaga diharapkan bukan untuk keperluan ekspor saja namun bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut di daerah tersebut.

Selama periode 2011-2015, sektor perekonomian yang menyerap tenaga kerja secara signifikan adalah sektor pertanian, angkutan dan telekomunikasi, dan jasa jasa. Sementara jumlah orang bekerja pertambangan, dan industri pengolahan cenderung menurun (Tabel 10). Sampai dengan tahun 2014 tenaga kerja di sektor industri pengolahan masih menunjukkan perubahan positif namun pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja di sektor ini semakin berkurang. Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa yang kurang produktif.

Tabel 10
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2015

No.	Lapangan Pekerjaan	2011	2015 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	1.360.265	1.475.142	114.877
2	Pertambangan	23.627	9.816	-13.811
3	Industri Pengolahan	124.697	93.189	-31.508
4	Listrik, Gas, Air	2.420	3.710	1.290
5	Bangunan	59.405	68.864	9.459
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	177.571	189.782	12.211
7	Angkutan & Telekomunikasi	97.407	123.745	26.338
8	Keuangan	20.910	28.480	7.570
9	Jasa-Jasa	270.199	337.806	67.607
Total		2.136.501	2.330.534	194.033

Sumber: BPS, 2015

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2014 adalah pada konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih besar dari 75persen (Tabel 11). Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah berkontribusi tinggi sebesar 38,47 persen pada PDRB ADHB, dan 28,03 persen pada PDRB ADHK 2010 sehingga perlu lebih ditingkatkan. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. NTT memiliki nilai strategis dan potensi unggulan untuk mengembangkan investasi. Potensi unggulan NTT meliputi sektor peternakan, perikanan, perkebunandan pariwisata. Keberagaman potensi dan komoditas NTT memerlukan sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan para *stakeholder* lainnya untuk mengembangkan perekonomian Provinsi NTT. Hal ini akan menjamin berkembangnya arus perdagangan dan investasi di Provinsi NTT yang dapat memperkuat daya saing daerah.

Tabel 11
PDRB Menurut Penggunaan 2014

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2010
1.	Konsumsi Rumah Tangga	75,32	78,70
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	3,39	40,52
3.	Konsumsi Pemerintah	30,69	3,63
4.	PMTB	38,47	28,03
5.	Perubahan Stok	1,49	1,47
6.	Ekspor	2,01	1,86
7.	Impor	1,61	1,58
8.	Net Ekspor Antar Daerah	-49,77	-56,62
Total		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2014

Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong dan merangsang masuknya investor sekaligus melakukan pengembangan dan peningkatan volume perdagangan produk-produk unggulan daerah yang ada di kabupaten dan kota di NTT. Empat kabupaten di Pulau Sumba memiliki potensi dan kekayaan masing-masing di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan potensi pariwisata, perkebunan cengkeh, mente dan tebu serta peternakan; Kabupaten Sumba Barat dengan potensi peternakan, perkebunan kakao, perkampungan budaya, pertanian; Kabupaten Sumba Tengah dengan potensi peternakan, pasir besi di pantai utara, infrastruktur pelabuhan, pertambangan, pariwisata, perkebunan; serta Kabupaten Sumba Timur dengan potensi peternakan, pariwisata, perkebunan, tambak garam, energi terbarukan, rumput laut dan perikanan. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah.

3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Karakteristik Nusa Tenggara Timur yang berbentuk kepulauan membuat transportasi laut cukup berperan dalam mendukung mobilisasi di wilayah ini. Sementara untuk interkoneksi transportasi darat secara keseluruhan wilayah NTT dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 20.508 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di NTT untuk mendukung transportasi darat belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 12). Sementara itu ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan untuk mendukung transportasi antar pulau masih belum memadai dan kualitasnya relatif masih kurang baik.

Tabel 12
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2014

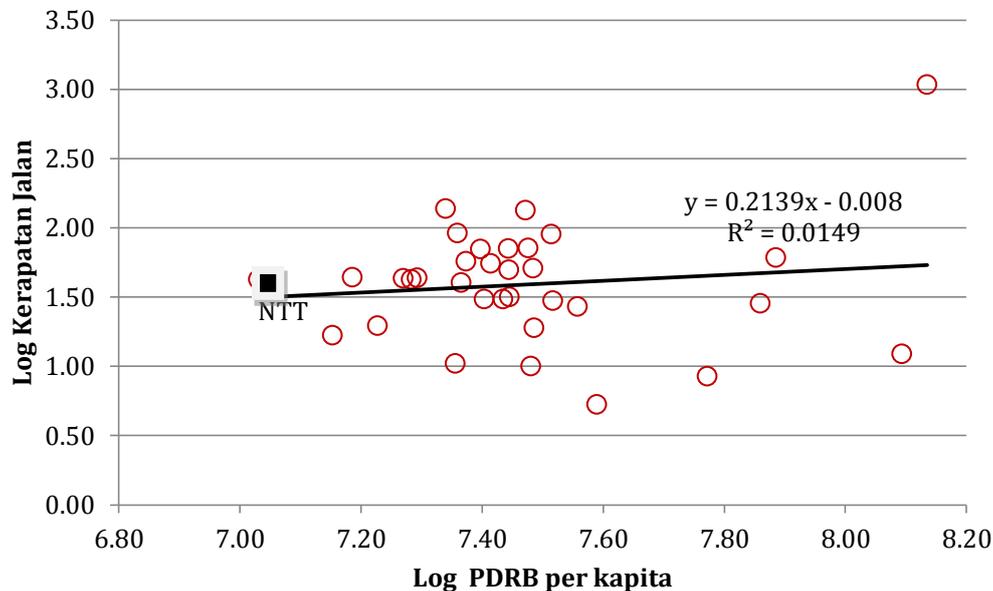
No.	Provinsi	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	136.407,58	1068,36
2	D.I Yogyakarta	21.873,72	136,19
3	Bali	29.666,48	133,20
4	Jawa Tengah	22.858,32	90,56
5	Jawa Timur	32.703,80	89,03
6	Banten	29.961,85	70,84
7	Sulawesi Selatan	27.760,65	69,98
8	Jawa Barat	24.961,05	69,55
9	Kepulauan Riau	76.753,11	60,40
10	Lampung	23.648,76	56,85
11	Sumatera Barat	25.963,24	54,57
12	Sumatera Utara	30.482,59	50,41
13	Sulawesi Utara	27.804,68	49,14
14	Nusa Tenggara Barat	15.351,54	43,52
15	Bengkulu	19.631,40	43,06
16	Gorontalo	18.627,37	42,76
17	Nusa Tenggara Timur	10.742,42	42,10
18	Sulawesi Barat	19.211,14	41,93
19	Aceh	23.199,49	39,86
20	Sulawesi Tenggara	27.898,88	31,32
21	Sulawesi Tengah	25.316,32	30,38
22	Kalimantan Selatan	27.230,80	30,16
23	Kep Bangka Belitung	32.868,70	29,62
24	Riau	72.331,01	28,27
25	Jambi	36.088,33	26,65
26	Maluku Utara	16.872,31	19,39
27	Sumatera Selatan	30.627,55	18,71
28	Maluku	14.230,08	16,61
29	Kalimantan Timur	123.985,45	12,13
30	Kalimantan Barat	22.707,79	10,42

No.	Provinsi	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
31	Kalimantan Tengah	30.220,97	9,93
32	Papua Barat	59.156,84	8,40
33	Papua	38.891,99	5,26

Sumber: BPS (2014)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 22). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi NTT relatif baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia karena NTT tidak mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Ketersediaan jaringan jalan bukan menjadi permasalahan utama bagi NTT, namun ke depannya pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan lagi.

Gambar 22
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Tahun 2014



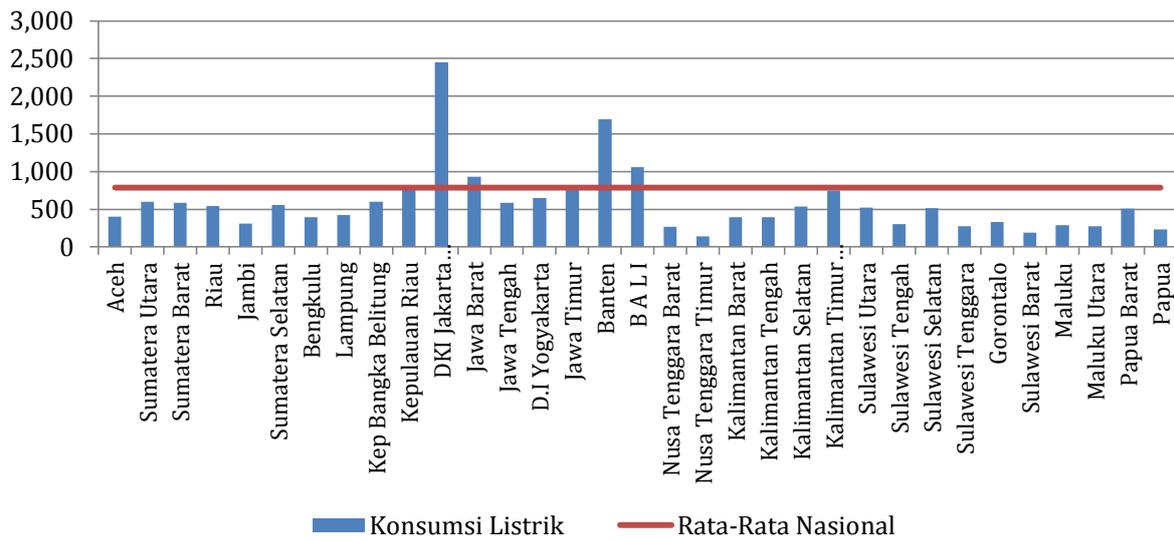
Sumber: BPS (2014) - diolah

Secara kualitas, fisik jalan di NTT kondisinya variatif, beberapa jalan sudah baik namun beberapa segmen jalan belum cukup baik. Pada beberapa kondisi jalan yang belum baik sering ditemukan kerusakan yang tidak hanya pada permukaan jalan tetapi juga sampai lapisan fondasi jalan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kota kecamatan dan desa di NTT masih terbelakang. Walaupun ada pembangunan jalan namun kondisi jalan yang menghubungkan kecamatan dan desa masih didominasi jalan yang buruk.

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di NTT termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 787,6 kWh (Gambar 23). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur

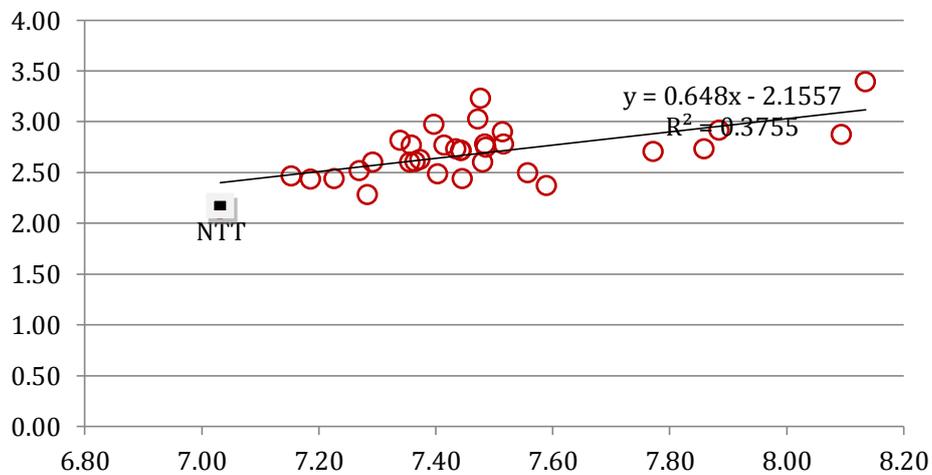
kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 24). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi NTT berada di bawah kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik NTT jauh lebih rendah dari di provinsi-provinsi yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di NTT walaupun sumber energi di NTT sangat berlimpah. Pembahasan mengenai kelistrikan terdapat pada pembangunan sektor energi.

Gambar 23
Konsumsi Listrik per Kapita (KWh) Tahun 2014



Sumber: Statistik PLN, 2014

Gambar 24
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2014

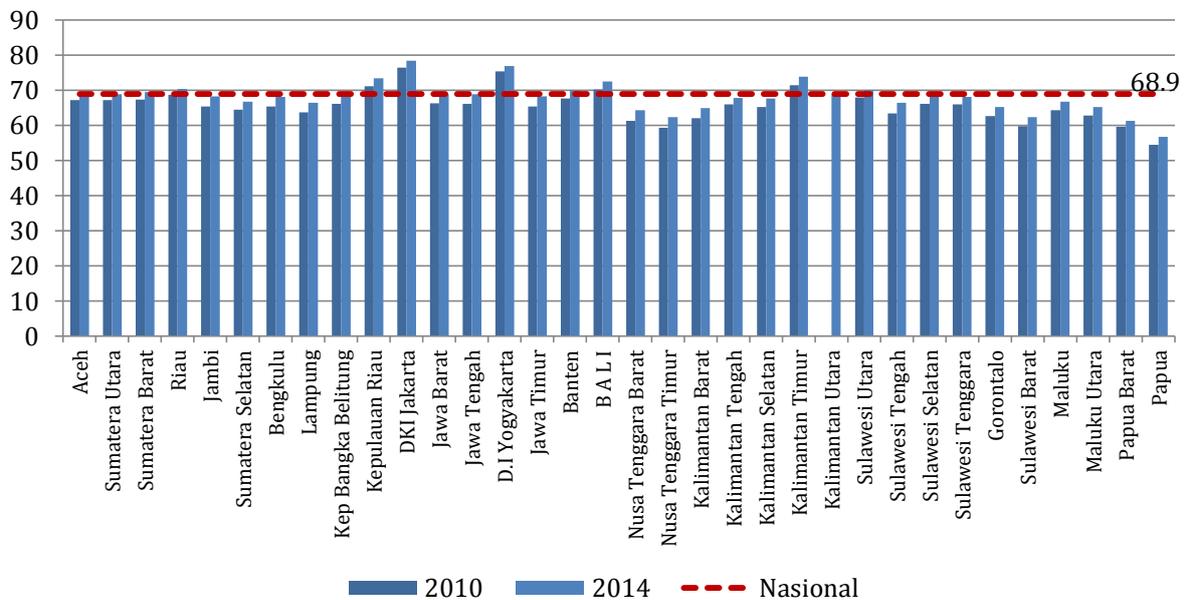


Sumber: BPS (2014), Statistik PLN (2014) – diolah

4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di NTT yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat yaitu sebesar 62,26 tahun 2014 dibandingkan tahun 2010 sebesar 59,21 namun masih berada di bawah IPM nasional sebesar 68,9 (Gambar 21). Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang lebih merepresentasikan kondisi saat ini. Rendahnya nilai IPM di NTT sejalan dengan rendahnya tingkat kemiskinan di provinsi ini. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan tingginya nilai pendapatan perkapita Provinsi NTT, yang menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Provinsi NTT masih berjalan eksklusif dan tidak merata.

Gambar 25
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2010 dan 2014



Nilai IPM menggunakan metode baru

Sumber: BPS, 2014

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di NTT dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 22,07 persen pada tahun 2012 menjadi 29,66 persen pada tahun 2015 (Tabel 13). Angkatan kerja dengan pendidikan SD dan SMP masih mendominasi angkatan kerja di NTT dan masih menunjukkan peningkatan yang besar. Perbaikan kualitas angkatan kerja merupakan modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis sumberdaya alam setempat.

Tabel 13
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan yang Ditamatkan	2012	2015	Perubahan
1	≤ SD	1.507.039	1.384.884	-122.155
2	SMP	258.746	307.231	48.485
3	SMA (Umum dan Kejuruan)	326.750	484.483	157.733
5	Diploma I/II/III/Akademi	67.297	77.063	9.766
6	Universitas	106.173	151.983	45.810
Total		2.266.005	2.405.644	139.639

Sumber: BPS, 2015

5. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di NTT nilainya kurang dari 1, menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Hal ini juga berarti kegiatan investasi di NTT ditentukan oleh simpanan masyarakat. Rasio tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,92, menunjukkan sumber permodalan masyarakat secara nasional memadai (Tabel 14).

Tabel 14
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2014

Wilayah	Posisi Pinjaman di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Simpanan di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Nusa Tenggara Timur	18.016,90	18.684,37	0,96	1,41
Nasional	3.707.916,34	4.013.816,57	0,92	0,85

Sumber: Bank Indonesia, 2015

Rendahnya posisi pinjaman di Provinsi NTT karena penyaluran kredit perbankan yang terkendala beberapa permasalahan, seperti kondisi geografis dan permintaan kredit dari debitur yang bersifat rendah. Tingkat bunga kredit bank umum maupun BPR juga saat ini masih dianggap terlalu tinggi untuk penyaluran kredit. Penyaluran kredit sebagian besar diberikan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, yang sejalan dengan sasaran pembangunan ekonomi Provinsi NTT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada golongan ini.

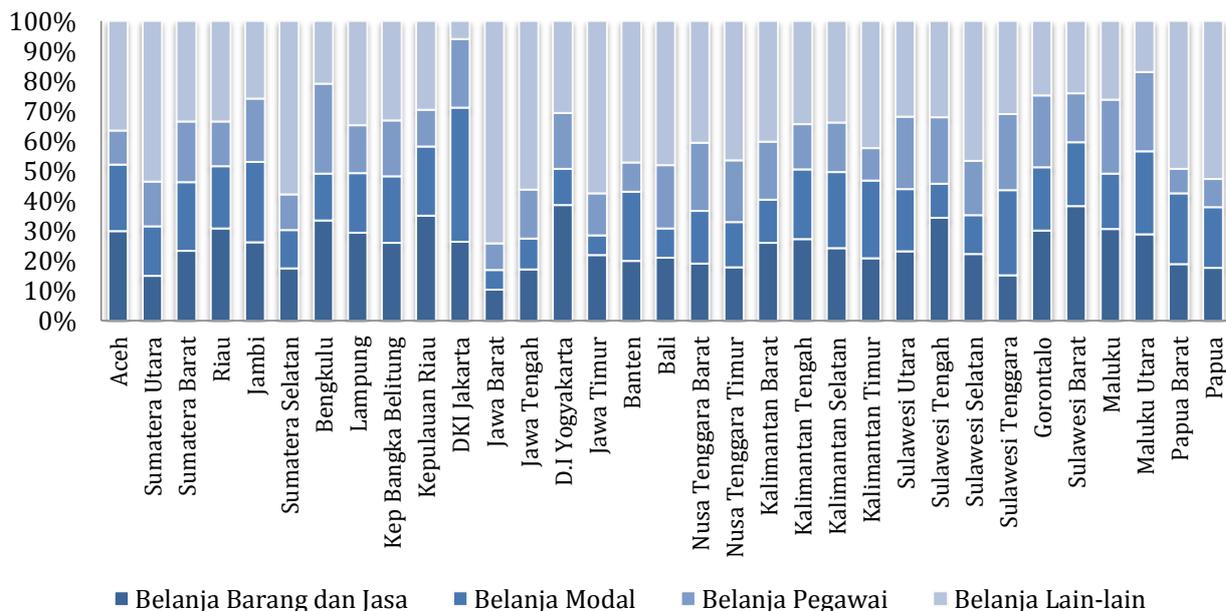
Rasio PMTB terhadap simpanan di Nusa Tenggara Timur nilainya lebih dari satu, menunjukkan mulai berkembangnya investasi fisik di daerah. PMTB biasa disebut investasi fisik karena dihitung dari penanaman modal yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan bukan dihitung dari realisasi penanaman modal yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

6. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di NTT. Rasio belanja modal di NTT pada tahun 2014 sebesar 15,07 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 20,60 (Gambar 26). Penyerapan belanja daerah dipengaruhi oleh kinerja SKPD sehingga peningkatan kinerja SKPD diharapkan dapat optimal. Apabila anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Belanja modal di NTT tergolong rendah seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, jamkesmas, PNPM, dan program sosial lainnya. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah NTT.

Gambar 26
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2014



Sumber: BPS, 2014

4. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Salah satu agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat
- b. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- c. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
- d. Peningkatan pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan;
- e. Peningkatan kemudahan perijinan usaha khususnya pada sektor pertanian dan industri pengolahan;
- f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur dan pengembangan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dan pembangunan SDM.
- g. Pembangunan jaringan jalan dan perbaikan kualitas jalan;
- h. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- i. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah;

5. PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Perkembangan perekonomian di NTT secara makro relatif baik meskipun belum diikuti perkembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di NTT tergolong rendah secara nasional sehingga menciptakan suasana kondusif bagi penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan. Percepatan pengembangan ekonomi NTT diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Untuk mengembangkan potensi pariwisata di provinsi ini diperlukan dukungan infrastruktur yang baik sehingga diperlukan masuknya investasi lebih besar di daerah. Modal pembangunan lain yang dimiliki NTT adalah komoditas unggulan pada bahan pangan, perikanan, dan produksi garam sebagai penggerak perekonomian daerah.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi NTT Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi NTT dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,0 – 9,5 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur perlu dikawal dengan komitmen bersama untuk mengatasi berbagai hambatan yang bersifat teknis maupun kebijakan. Pada tahun 2016 prospek pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) akan terus membaik namun risiko ke bawah masih ada. Secara spasial penyumbang NTT merupakan salah satu penyumbang akselerasi di KTI. Pengembangan industri kecil rakyat melalui UMKM diharapkan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi daerah.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di NTT harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 18,4 – 12,9 persen, sedangkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi NTT sebesar 19,8 persen, untuk itu diperlukan



upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2015-2019 Provinsi NTT harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 6,9 poin persentase atau 1,38 poin persentase per tahun.

3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi NTT akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah NTT maupun lingkungan eksternal. Dampak pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor kehutanan dan perikanan.



